

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS ABCD
(ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT)
DI KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Teknik Program
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik
Universitas Islam Riau



Oleh

SULISNO

NPM. 15 3410 868

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2020

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN BERBASIS ABCD (*ASSET BASED COMMUNITY
DEVELOPMENT*) DI KECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SULISNO
NPM : 152310868**

ABSTRAK

Pengembangan kawasan agropolitan perlu mendapatkan perhatian masyarakat dalam konsep pengembangan kawasan agropolitan pada jangka panjang. Pengembangan kawasan agropolitan yang di kembangkan melalui partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu lokomotif perekonomian daerah tersebut. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan khususnya aset lokal di Kecamatan Rambah Samo, merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dengan metode yang tepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah strategi penerapan konsep ABCD (*Aset Based Comunnity Development*) terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo. Untuk menganalisis strategi menggunakan metode analisis SWOT dan diterapkan kepada konsep ABCD (*Aset Based Comunnity Development*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo dalam kategori tingkat partisipasi masih kurang, 80% dari masyarakat yang mengatakan tidak pernah berpartisipasi dalam pengembangan kawasan agropolitan. Model penerapan ABCD (*Asset Based Community Development*) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang dapat memaksimalkan potensi pertanian (sumber daya alam) di wilayah setempat, meningkatkan serta membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan agropolitan, dapat meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat dan dapat mengembangkan kemandirian masyarakatnya. Metode ABCD diterapkan dalam 4 langkah yaitu, *Discovery, Dream, Design* dan *Define*

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengembangan, Agropolitan, ABCD (*Aset Based Comunnity Development*), SWOT

**COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF ABCD-BASED
AGROPOLITANTS (ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT) IN
RAMBAH SAMO DISTRICT, ROKAN HULU REGENCY**

SULISNO
NPM : 152310868

ABSTRACT

The development of an agropolitan area needs to get people's attention in the concept of developing an agropolitan area in the long term. The development of an agropolitan area that is developed through community participation can be one of the locomotives of the regional economy. The low level of community participation in the development of agropolitan areas, especially local assets in Rambah Samo District, is a problem that must be resolved with the right method.

The purpose of this research is a strategy to apply the concept of ABCD (Aset Based Communication Development) to community participation in the development of agropolitan areas in Rambah Samo District. To analyze the strategy using the SWOT analysis method and applied to the concept of ABCD (Asset Based Community Development).

The conclusion of this study is that the level of community participation in the development of an agropolitan area in Rambah Samo District is in the category of lack of participation, 80% of the people who say they have never participated in the development of an agropolitan area. The ABCD (Asset Based Community Development) application model for Community Participation in the Development of Agropolitan Areas in Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency which can maximize agricultural potential (natural resources) in the local area, improve and build facilities and infrastructure to support agropolitan development activities, can increase socio-economic community and can develop the independence of the community. The ABCD method is applied in 4 steps, namely, Discovery, Dream, Design and Define

Keywords: Community Participation, Development, Agropolitan, ABCD (Aset Based Community Development), SWOT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahua wa Ta'ala atas berkat dan rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*) Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu” sebagaimana Tugas Akhir ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallahu'alaihi wa sallam karena Belaulah yang telah mengantarkan kita kedunia penuh ilmu seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis telah banyak memperoleh berbagai dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ayahanda H. Abdul Muis (ALM), Ibunda Hj. Rokiah (ALM), Abanganda Amrizal, SE dan keluarga besar yang telah memberi segala kasih sayang, do'a, motifasi, meteri dan pengorbanan yang tidak terhingga.
2. Ibu Puji Astuti, ST.,MT selaku Ketua Prerogram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Muhammad Sofwan, ST.,MT selaku sekretaris Prerogram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universiatas Islam Riau.
4. Ibu Puji Astuti, ST.,MT selaku dosen pembimbing I dan Ibu Febby Asteriani, ST.,MT selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan pengarahannya dan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Riau khususnya dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf TU Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dalam administrasi penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan akatan 2015 kelas C yang senantiasa rela berbagi ilmu, motivasi, persaudaraan, waktu, solidaritas dan canda tawa.
8. Serta seluruh pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang akan membantu untuk perbaikan dimasa akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 12 Desember 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	6
1.3.1 Tujuan.....	6
1.3.2 Sasaran.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Materi.....	7
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	9
1.6 Kerangka Pikir.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	14
2.1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	16
2.1.2 Faktot – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	19
2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Agropolitan.....	20
2.1.4 Strategi Pengembangan Partisipasi.....	23
2.1.5 Forum Antar <i>Stakeholders</i>	27
2.2 Pengembangan Kawasan.....	30
2.3 Pengertian Umum dan Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan.....	32
2.3.1 Pengertian Umum Agropolitan.....	32
2.3.2 Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan.....	33
2.4 ABCD (<i>Asset Based Comunnity Development</i>).....	36
2.4.1 Teori ABCD (<i>Asset Based Comunnity Development</i>).....	36
2.4.2 Aset.....	38
2.4.3 Model Penerapan <i>Asset Based Comunnity Development</i>	40
2.5 Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas.....	41
2.5.1 Pengertian Sumber Daya Berbasis Komunitas.....	41
2.5.2 Karakteristik Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas.....	42
2.5.2.1 Desentralisasi.....	42
2.5.2.2 Pemberdayaan.....	46
2.5.2.3 Peroses Belajar Sosial.....	49

2.5.2.4 Keberlanjutan.....	54
2.6 Kandungan Ayat AL-Qur'an.....	56
2.6.1 Kandungan Ayat AL-Qur'an Dengan Partisipasi Masyarakat.....	56
2.6.2 Kandungan Ayat AL-Qur'an Dengan Agropolitan.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Jenis Penelitian.....	61
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	61
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	61
3.3.2 Waktu Penelitian.....	62
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	62
3.4.1 Jenis Data.....	62
3.4.2 Sumber Data.....	62
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	63
3.5.1 Kuisisioner.....	63
3.5.2 Observasi.....	63
3.5.3 Studi Pustaka.....	64
3.5.4 Dokumen.....	64
3.6 Bahan dan Alat Penelitian.....	64
3.7 Objek Penelitian.....	64
3.7.1 Objek Fisik.....	65
3.7.2 Objek Non-Fisik.....	65
3.8 Populasi dan sampel.....	65

3.9 Metode Analisis Data.....	66
3.10 Teknik Analisis.....	66
3.11 Sekala Pengukuran Instrumen.....	67
3.12 Variabel Penelitian.....	68
3.13 Definisi Operasional.....	72

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu.....	74
4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	76
4.1.2 Kondisi Fisik Kabupaten Rokan Hulu.....	79
4.1.2.1 Topografi.....	79
4.1.2.2 Klimatologi.....	80
4.1.2.3 Geologi.....	80
4.1.2.4 Hidrologi.....	81
4.1.3 Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu.....	82
4.1.3.1 Jumlah Penduduk.....	82
4.1.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	83
4.1.3.3 Pesebaran Penduduk.....	84
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rambah Samo.....	85
4.2.1 Administrasi dan Letak Geografis.....	86
4.2.2 Kependudukan Kecamatan Rambah Samo.....	88
4.2.2.1 Jumlah Penduduk.....	88
4.2.2.2 Kepadatan Penduduk.....	89

4.3 Kondisi Pertanian.....	90
4.4 Kawasan Peruntukan Pertanian.....	91
4.5 Program Pertanian di Kecamatan Rambah Samo.....	92

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi aset lokal dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah	94
5.1.1 Aset Manusia.....	94
5.1.2 Aset Finansial.....	97
5.1.3 Aset Sosial.....	98
5.1.4 Aset Fisik.....	100
5.1.5 Aset Natural.....	107
5.2 Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Rambah Samo.....	112
5.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan.....	112
5.2.2 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pikiran/Ide.....	113
5.2.3 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tenaga.....	114
5.2.4 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Sumbangan Finansial/ Uwang Dan Meteri/Barang.....	115
5.3 Strategi penikatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis ABCD (<i>Asset Based Community Development</i>) di Kecamatan Rambah Samo.....	116
5.3.1 Analisis SWOT.....	116

5.3.1.1 Analisis Lingkungan Internal.....	117
5.3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal.....	118
5.3.2 Model Penerapan <i>Asset Based Community Develoment</i> Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.....	123
5.3.2.1 <i>Discovery</i> (Menemukan).....	123
5.3.2.2 <i>Dream</i> (Mimpi).....	124
5.3.2.3 <i>Desin</i> (Merancang/Merencanakan).....	126
5.3.2.4 <i>Define</i> Menentukan).....	127
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	129
6.2 Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	17
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	58
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....	70
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	78
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018.....	82
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2010 – 2018.....	83
Tabel 4.4	Pesebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.....	84
Tabel 4.5	Luas Kecamatan Rambah Samo Dirinci Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2018.....	87
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	88
Tabel 4.7	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Rambah Samo Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2018.....	89
Tabel 5.1	Sebaran Tingkat Pendidikan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	94
Tabel 5.2	Sebaran Kelompok Umur di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	95
Tabel 5.3	Sebaran Jumlah Petani di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018...	96

Tabel 5.4	Sebaran Jumlah Usaha di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018...	96
Tabel 5.5	Sebaran Jumlah Lembaga Keuangan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	97
Tabel 5.6	Sebaran Kelompok Tani dan Petani Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	98
Tabel 5.7	Sebaran Pegawai Pada Intansi Dinas Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	99
Tabel 5.8	Sebaran Jumlah Pelanggan Pada PDAM Rambah Samo Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	100
Tabel 5.9	Sebaran Jumlah Langganan Pascabayar Listrik Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	101
Tabel 5.10	Sebaran Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	102
Tabel 5.11	Sebaran Jumlah Pasar Umum Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	103
Tabel 5.12	Sebaran Jumlah Hotel dan Rumah Makan/Warung di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	104
Tabel 5.13	Sebaran Jumlah Sekolah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	104
Tabel 5.14	Jumlah Jalan Utama di Desa Menurut Desa/Kelurahan dan jenis Permukaan Jalan di Kecamatan Rambah Samo.....	105
Tabel 5.15	Jumlah Suangai Yang Melintasi Desa Menurut Desa/Kelurahan	

	di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	108
Tabel 5.16	Jumlah Potensi Pertanian dan Perkebunan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	109
Tabel 5.17	Jumlah Potensi Ternak Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018.....	110
Tabel 5.18	Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pikiran/Ide.....	113
Tabel 5.19	Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tenaga.....	114
Tabel 5.20	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Sumbangan Finansial dan Meteri.....	116
Tabel 5.21	Analisis SWOT Lingkungan Internal (<i>Strength</i> dan <i>Weakness</i>) Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.....	118
Tabel 5.22	Analisis SWOT Lingkungan Eksternal (<i>Opportunity</i>) dan (<i>Threat</i>) Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.....	119
Tabel 5.23	Matriks SWOT Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kecamatan Rambah Samo.....	10
Gambar 1.2	Kerangka Pikir.....	11
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu.....	77
Gambar 4.2	Kondisi Pertanian di Desa Rambah Baru.....	90
Gambar 5.1	Kondisi Jalan Yang Belum di Semenisasi/Aspal di Deda Rambah Baru.....	106
Gambar 5.2	Kondisi Saluran Irigasi di Desa Rambah Baru.....	107
Gambar 5.3	Partisipasi Masyarakat Dakam Pengembangan Kawasan Agropolitan.....	112

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia disebut Negara Agraris, karena kurang lebih 75% penduduknya hidup di pedesaan dan sebagian besar (54%) bergantung hidup dari sektor pertanian, (Suyetno, 2008). Sektor pertanian telah menggerakkan perekonomian nasional, dan pada periode Tahun 1980-1990 telah memberikan kontribusi utama dalam penurunan tingkat kemiskinan. Pada saat terjadi krisis ekonomi akhir Tahun 1997 sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja non pertanian yang kehilangan pekerjaan. Peranan sektor pertanian semakin kokoh dengan ditetapkannya revitalisasi pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional (Efendi, 2016).

Rustiadi (2001) mengatakan bahwa agropolitan yaitu kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan (agribisnis) dari wilayah sekitarnya. Mengembangkan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah, kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa disekitarnya yang membentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan ini juga dicirikan kawasan dengan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian agribisnis di wilayah sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistim produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki kerungan satuan sistim permukiman dan sistim agrobisnis.

Kawasan agropolitan yang ditetapkan sebagai lokasi Rencana Kawasan Agropolitan didasarkan atas kriteria yang ada serta berdasarkan dari dokumen Rencana Program Inventasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2019, yang berada di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Setelah diidentifikasi memiliki aset-aset atau potensi dominan yang ada di dalam masyarakat dapat menjadi unggulan dan dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengembangan kawasan agropolitan sekarang ini menjadi *trend* tersendiri untuk dikembangkan di wilayah pedesaan yang salah satunya di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Langkah ini diharapkan agar kedepannya akan menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan yang bermuara pada pengembangan sumberdaya lokal, peningkatan produksi pertanian selama ini belum disertai dengan peningkatan pada ketahanan pangan para petani. Pengembangan kawasan agropolitan ini dapat menekan laju urbanisasi penduduk desa menuju kota dengan adanya pusat baru didesa dengan fokus utama pertanian yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan serta menjamin kesejahteraan penduduk Kecamatan Rambah Samo Kabupen Rokan Hulu.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan perlu mendapatkan perhatian masyarakat dalam konsep pengembangan kawasan agropolitan pada jangka panjang. Dengan demikian, pengembangan kawasan agropolitan yang di kembangkan melalui partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu lokomotif perekonomian daerah tersebut. Serta menjangkau berbagai elemen baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Mahi (2014) mengatakan suatu konsep pengembangan berdasarkan aspirasi masyarakat bahwa yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, organisasi, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan).

Suatu program yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat, baik kedudukannya sebagai objek maupun subyek dalam pengembangan kawasan agropolitan. Masyarakat sebaiknya ikut serta atau berperan aktif dengan pemerintah untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Partisipasi di sini bisa berupa partisipasi buah pikir atau ide, partisipasi keterampilan atau tenaga, partisipasi sosial dan partisipasi dalam pengembangan kawasan. Dari partisipasi ini banyak hal yang dapat diserap, diantaranya rasa kompetisi, rasa tanggung jawab dan solidaritas.

Bedasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu, permasalahan di sektor pertanian, meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, alih fungsi lahan

tanaman pangan, belum optimalnya sistim perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energy, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani, kurang harmonisnya koordinasi kerja antara sektor dan sub sektor terkait dalam pembagunan pertanian dan kurang partisipasi terhadap pengembangan pertanian

Potensi unggulan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo yaitu persawahan padi degan nama kelompok tani “Berang Mukti” dan kebun salak pondoh degan nama kelompok tani “Agripondoh” yang berada di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo. Kawasan persawahan padi beberapa masyarakat di jadikan perkebunan karet dan tidak terawatnya perkebunan salak pondoh sehingga perkebunan menjadi semak. Tutup nya pasar agropolitan di Kecamatan Rambah Samo sehingga masarakat menjual hasil produksi tani di tempat panen seperti hasil salak pondoh, sehingga masyarakat ingin membeli salak pondoh langsung kekebun dan masyarakat yang ingin membeli beras hasil panan petani di Kecamatan Rambah Samo langsung membeli di pekilanggan padi di setempat.

Salah satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakt dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo khususnya aset lokal. Selain itu Kecamatan Rambah Samo pemerintah belum menyediakan Prasana Sarana Dasar (PSD) yang cukup untuk menujung perkembangan produksi dan jasa, seperti jalan semenisasi yang belum

merata, saluran irigrasi yang masih kecil, dan Kecamatan Rambah Samo memiliki PSD yang cukup baik untuk menjangkakan perkembangan produksi dan jasa, seperti jaringan listrik dan telepon serta mempunyai jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi standar penyediaan fasilitas sosial maupun ekonomi.

Bedasarkan uraian tersebut implementasi dari suatu partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan hendaknya diimbangi dengan turut berpartisipasi masyarakat dengan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset demi suatu keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan, karena dengan partisipasi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa merawat dan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan sehingga bersifat keberlanjutan.

Bedasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti menggunakan metode pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) diharapkan dapat mengarahkan masyarakat di kawasan agropolitan Kecamatan Rambah Samo untuk ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung serta berkerjasama secara berkelanjutan dengan pihak pemerintah maupun non pemerintah untuk pengembangan aset-aset dan pengembangan kawasan agropolitan sebagai aset potensial pengembangan yang terdapat di Kecamatan Rambah Samo. Maka penulis membuat judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPILITAN BERBASIS ABCD (*Asset Based Community Development*) DI KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU”

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengungkapkan pernyataan rumusan masalah yang termuat dalam suatu rumusan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat sampai saat ini masih rendah dalam pengembangan kawasan agropolitan khususnya aset lokal di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan masih kurang karna masyarakat belum mengoptimalkan kawasan agropolitan dan pemerintah belum menyediakan Prasarana Sarana Dasar (PSD) yang cukup untuk menukung perkembangan produksi dan jasa, seperti jalan semenisasi yang belum merata, saluran irigrasi yang masih kecil.
3. Menerapkan metode ABCD (*Asset Based Community Developmet*) untuk strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan dengan partisipasi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa merawat dan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan sehingga bersifat berkelanjutan.

Adapun pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap aset lokal dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu ?

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan dan peran pemerintah untuk menyediakan prasana sarana dasar yang cukup untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa ?
3. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis ABCD (*Asset Based Community Developmet*) di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Bedasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi penerapan konsep ABCD (*Aset Based Comunnity Development*) terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupen Rokan Hulu.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi aset lokal dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*) di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat

Adapun yang menjadi manfaat diadakannya penelitian ini antara lain :

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi dasar bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal perencanaan pengembang kawasan agropolitan khususnya di Kecamatan Rambah Samo Kabupen Rokan Hulu.
- b. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi aset lokal dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, menggunakan metode analisis deskriptis kualitatif yang mana indikatornya adalah :

1. Warga/Masyarakat
 - a. Aset Manusia;
 - Pendidikan;
 - Umur/Usia;
 - Jumlah Petani;
 - Jumlah Pengusaha;
 - b. Aset Finansial.
 - Lembaga Keuangan
2. Organisasi Lokal
 - a. Aset Sosial.

- Jumlah Kelompok Tani;
- Jumlah Pegawai Intasi Pemerintahan;

3. Fasilitas

a. Aset Fisik;

- Air Bersih
- Listrik;
- Peribadatan;
- Perdagangan dan Jasa (pasar,hotel,dan rumah makan/warung);
- Sarana Pendidikan.
- Jalan
- Irigasi

b. Aset Natural.

- Sungai;
- Objek/Daya Tarik Wisata
- Pertanian dan Perkebunan;
- Peternakan;

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang masuk dalam wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Rambah Samo Kabupen Rokan Hulu Provinsi Riau, Indonesia.

Kecamatan Rambah Samo berbatasan degan :

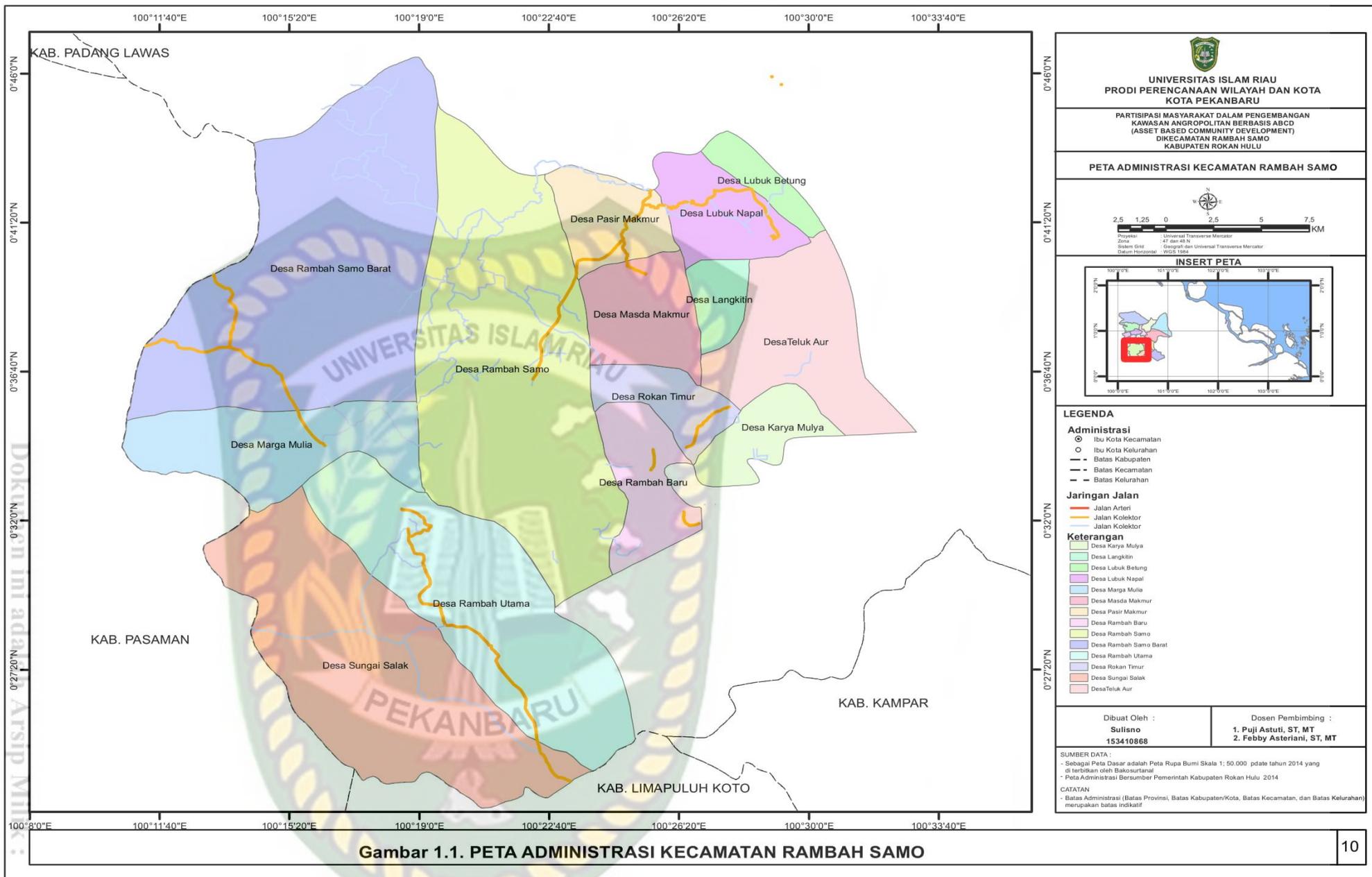
- a. Utara : Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan
- b. Selatan : Kecamatan Rokan IV Koto
- c. Barat : Kecamatan Rambah

d. Timur : Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Kunto Darussalam



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

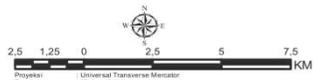




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
KOTA PEKANBARU

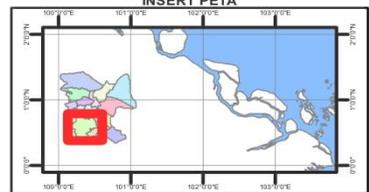
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN ANGRUPOLITAN BERBASIS ABCD
(ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT)
DIKECAMATAN RAMBAH SAMO
KABUPATEN ROKAN HULU

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN RAMBAH SAMO



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Zona : 47 dan 48 N
 Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984

INSERT PETA



LEGENDA

Administrasi

- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Kolektor

Keterangan

- Desa Karya Mulya
- Desa Langkitin
- Desa Lubuk Betung
- Desa Lubuk Napal
- Desa Marga Mulya
- Desa Masda Makmur
- Desa Pasir Makmur
- Desa Rambah Baru
- Desa Rambah Samo
- Desa Rambah Samo Barat
- Desa Rambah Utama
- Desa Rokan Timur
- Desa Sungai Salak
- Desa Teluk Aur

Dibuat Oleh : Sulisno 153410868	Dosen Pembimbing : 1. Puji Astuti, ST, MT 2. Febby Asteriani, ST, MT
--	--

SUMBER DATA :

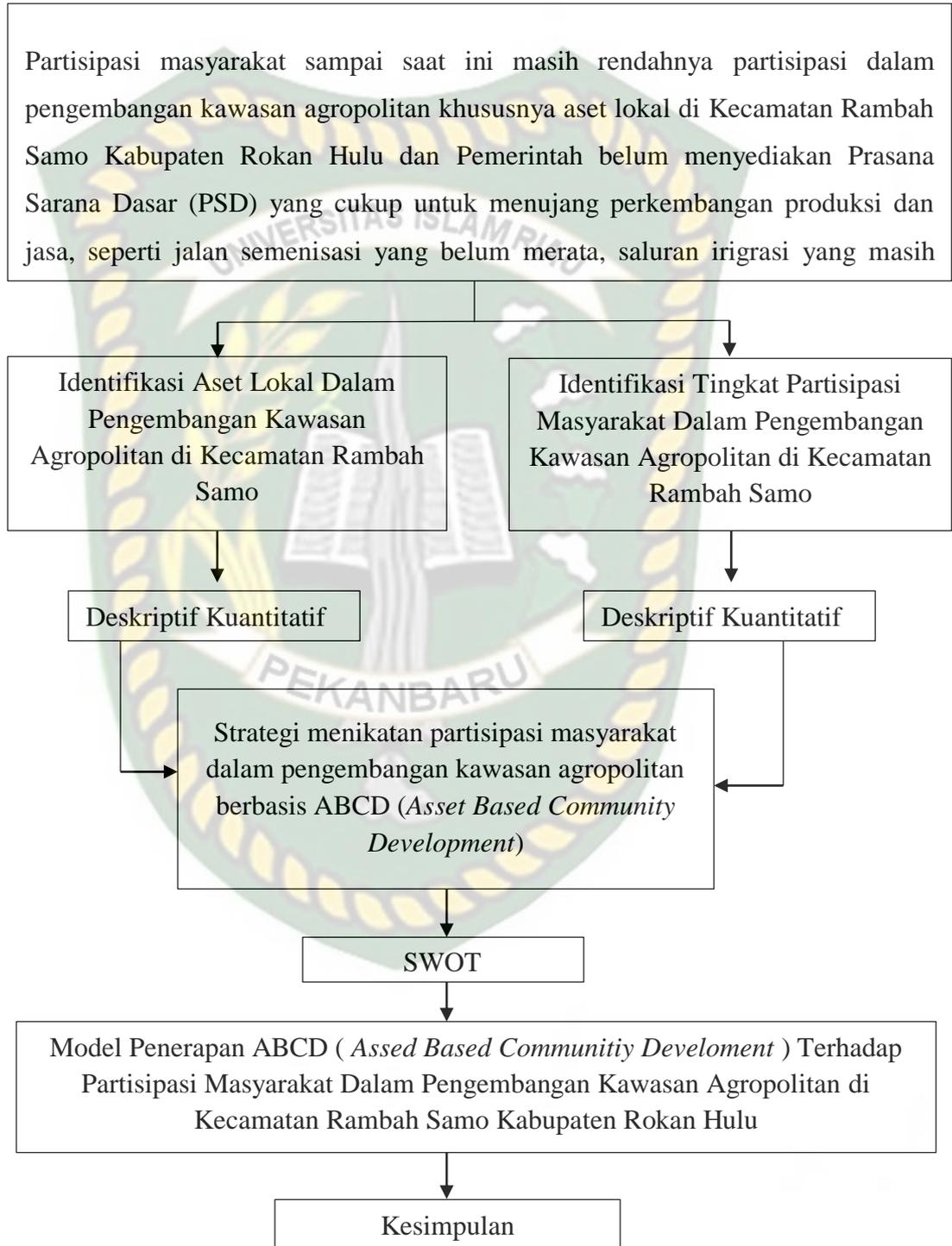
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Skala 1 : 50.000 pada tahun 2014 yang di terbitkan oleh Bakosurtanal
- Peta Administrasi Bersumber Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 2014

CATATAN

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota, Batas Kecamatan, dan Batas Kelurahan) merupakan batas indikatif

Gambar 1.1. PETA ADMINISTRASI KECAMATAN RAMBAH SAMO

1.6 Kerangka Pikir



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini adalah secara berurutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian ini berisi pendahuluan yang merupakan rangkaian penelitian meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka piker dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal yang mendasar secara teoritis dan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Penjelasan tersebut mengenai pengertian partisipasi masyarakat, pengembangan kawasa, pengertian umum dan ciri-ciri kawasan agropolitan, teori *asset based community development*, pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, kandungan ayat Al-Qur'an.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, objek penelitian, metode analisis data, variabel penelitian, defenisi operasional.

BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Dalam gambaran umum wilayah menceritakan tentang lokasi yang diteliti, seperti profil wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan profil wilayah Kecamatan Rambah Samo, kondisi pertanian dan kawasan peruntukan pertanian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menganalisis dan memaparkan hasil analisis dari setiap sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis deskriptif kualitatif.

BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup dari laporan Tugas Akhir yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Sarjono (2001) menyebutkan keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, data di sebutkan partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebur partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemauan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat bertisisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak yang lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan berkembang secara mandiri.

Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya. Agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan agar ada kesinambungan dan peningkatan yang bersifat kumulatif dari partisipasi masyarakat melalui berbagai tindakan bersama dan aktivitas lokal. Dengan demikian, berarti pendekatan

partispatoris harus dilihat sebagai pendekatan utama dalam strategi Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komunitas.

Menurut Suroyo (dalam Ratika 2016), mengatakan misalnya menginventarisasi adanya enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi. Pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam suatu pemeningkatan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek - proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Keempat, partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan *monitoring* proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil. Partisipasi sebagai alat sekaligus tujuan. Dengan demikian, dalam proses pembangunan akan terjadi perkembangan dan

peningkatan kapasitas masyarakat secara kumulatif yang tercermin dalam proses yang berkelanjutan.

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal, telah terjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktivitas lokal berikutnya. Dari sudut pandang yang lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input sekaligus output. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, di lain pihak, juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan juga merupakan pencerminan, bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada hasil secara fisik materiil.

2.1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pengembangan kawasan agropolitan sangat penting di masyarakat kepada semua pelaku yang terlibat. Partisipasi tidak berarti hanya berasal masyarakat saja, tetapi partisipasi harus datang dari semua pihak baik rakyat atau masyarakat maupun pemerintah, pihak swasta dan lain-lain (Khairudin, 2000). Jadi kiranya bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kemampuan sistem pengelolaan sumber daya kawasan agropolitan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk mengambil

bagian secara aktif, mulai dari kegiatan identifikasi masalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan.

Partisipasi masyarakat secara umum terbagi dalam delapan tingkat menurut Arstein (dalam Arief, 2018) tingkatan-tingkatan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

NO	Tingkat Partisipasi Masyarakat	
1	<i>Manipulation</i>	Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah karena masyarakat hanya dipakai namanya saja sebagai anggota dalam/sebagi badan panasehat. Tidak ada peran yang nyata, karena hanya diselewengkan sebagai publikasi oleh pihak penguasa.
2	<i>Theraphy</i>	Pada tingkat ini, masyarakat diperlukan seolah-olah seperti proses penyembuhan pasien penyakit jiwa dalam grupnterapi. Masyarakat terlibat dalam bnayak kegiatan, namun hal tersebut hanya ditunjukkan untuk merubah pola piker masyarakat dari pada mendapatkan informasi atau usulan-usulan.

3	<i>Informing</i>	<p>Merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak, tanggung jawab dan berbagi pilihan. Biasanya hanya di berikan secara satu arah, dari penguasa ke rakyat, tanpa adanya kemungkinan umpan balik, pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk mempengaruhi rencana bagi kepentingan masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara media berita, pamphlet, poster dan tanggapan atas pertanyaan.</p>
4	<i>Consultation</i>	<p>Mengandung opini masyarakat, setelah memberi informasi kepada mereka. Apabila konsultan tidak disertai dengan cara-cara partisipasi yang lain, maka tingkat keberhasilannya akan trendah, mengingat tidak adanya jaminan cara pertemuan lingkungan, survei tentang pola pikir masyarakat dan dengar pendapat publik.</p>
5	<i>Placation</i>	<p>Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai pengaruh, meskipun dalam beberapa hal masih ditentukan oleh penguasa. Beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan kerja sama. Usul-usul dari masyarakat berpengasilan rendah dapat dikemukakan, tetapi sering tidak dipengaruhi karena kemampuan dan kedudukannya relative rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit bila dibandingkan dengan anggota-anggota instansi pemerintah lainnya.</p>

6	<i>Partnership</i>	<p>Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagi hal dibagi antar masyarakat dengan pihak penguasa. Disepakati juga pembagian tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagi permasalahan yang dihadapi. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan secara sepihak.</p>
---	--------------------	--

7	<i>Delegated power</i>	<p>Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Masyarakat berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka. Untuk memecahkan masalah, pemerintah harus mengadakan tawar-menawar tanpa adanya tekanan.</p>
8	<i>Citizen control</i>	<p>Pada tingkat ini masyarakat mempunyai kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bidang kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan.</p>

Sumber : Arstein dalam Arief, 2018

2.1.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell (2008) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yaitu :

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Merupakan diri kelompok usia mengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagi bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah dapur yang berarti bahwa dalam masyarakatperanan perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang sangat baik.

c. Pendidikan

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejah teraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan yang baik akan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

e. Lamanya Tingal

Lamayan seseorang tigel dalm lingkungan tertentu dan pengalamnya berinteraksi. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tersebut, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlibat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Agropolitan

Apabila kita menyadari bahwa partisipasi masyarakat yang aktif akan kembali berdampak pada kepentingan mereka sendiri, karena dalm pengembangan suatu objek dibutuhkan kerjasama dengan setiap lapisan masyarakat di dalamnya agar dapat mengembangkan potensi serta peluang yang ada. Terdapat dua klasifikasi partisipasi dilihat dari keterlibatannya menurut Sundariningrum (dalam Arief,2018) yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Menurut Dusseldorp (dalam Arief, 2018) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan setiap warga masyarakat dapat berupa :

a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.

- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk mengerakan partisipasi masyarakat.
- d. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Memanfaatkan hasil-hasil yang diciptakan dari kegiatan masyarakat.

Menurut Cohen (dalam Arief, 2018) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan dalam empat jenis yaitu :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini bersifat sangat penting alternative berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan bersama. Wujud partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehidupan rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Ini adalah jenis partisipasi yang menjadi salah satu unsur dalam penentu keberhasilan program itu sendiri. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan meliputi mengerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrative dan koordinasi mserta penjabaran program.

- c. Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan

Partisipasi ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari pelaksanaan program yang dicapai.

- d. Partisipasi dalm evaluasi

Partisipasi ini bertujuan untuk mengtauhi bagaimana pelaksanaan program nerjalan, apabila sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

a. Partisipasi dalam perencanaan

Dalam tahap ini, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Proses perencanaan tersebut lebih menuju pada tujuan pembagunan, dan penyusun rancana. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyakat yaitu memberikan usulan, saran, diskusi, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat dilihat agar mengerakan sumber daya dan dana dalam pelaksanaan pembagunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan yaitu memberi tenaga, uang, ide-ide sebagi wujud paerisipasi pada pekerjaan tersebut, masyarakat ikut dalam kegiatan administrative, dan koordinasi serta penyebaran program.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan

Pada tahap pemanfaatan, masyarakat berpartisipasi terkait dengan hasil dari pelaksanaan berupa kualitas dan kuantitas yang telah dicapai. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenfaatan yaitu berupa tenaga dan uwang yang digunakan untuk memelihara proyek yang tercapai.

d. Partisiapasi dalam evaluasi

Dalam tahap evaluasi, masyarakat berticipasi untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pengembangan, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat itu dilakukan oleh seseorang atas kesadaran orang tersebut untuk ikut melakukan kegiatan, wujud partisipasi dapat berupa menyumbangkan pemikiran, ide-ide, tanggapan, juga memberi penolakan, selain itu juga berupa meteri, pikiran dan arahan saat pelaksanaan program, serta uang atau *financial*.

2.1.4 Strategi Pengembangan Partisipasi

Menurut Mikkelsen (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan rasional yang mendasari strategi pengembangan partisipasi masyarakat. Secara normative asumsi yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat lokal harus memperoleh proyek dan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya, dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Dengan demikian, apabila program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil masyarakat sendiri maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

Asumsi normatif dan asumsi deduktif tersebut kemudian dapat dilanjutkan dengan pengembangan asumsi teoretik yang menjelaskan hubungan sebab akibat.

Beberapa asumsi teoretik yang dikembangkan Mikkelsen (2015) lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut ini.

- a. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antar kelompok-kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat adalah mungkin.
- b. Pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi masyarakat. Asumsi ini ingin menempatkan partisipasi masyarakat sebagai sarana sekaligus tujuan dari proses pembangunan.
- c. Pemberdayaan masyarakat mutlak perlu mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk program pembangunan yang ditetapkan masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri mempunyai kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti ada penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri, dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana program.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan oleh adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat berpartisipasi. Hambatan struktural yang sering termanifestasikan dalam bentuk konflik kepentingan perlu diatasi melalui musyawarah mufakat, atau menghilangkan struktur sosial yang menghambat melalui reformasi structural.

Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk mengembangkan strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dari berbagai bentuk dan jenis strategi pengembangan partisipasi

tersebut dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan keluasan partisipasi yang diharapkan dari warga masyarakat di satu pihak, dan proporsi peranan yang dilakukan oleh pihak eksternal di lain pihak. Dalam Mikkelsen (2015) dijelaskan dan diuraikan berdasarkan kriteria tersebut membedakan adanya empat pendekatan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat.

- a. Pendekatan partisipasi pasif, pelatihan dan informasi. Pendekatan ini berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill dan sumber daya. Dengan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah, hubungan pihak eksternal dan masyarakat lokal bersifat vertikal.
- b. Pendekatan partisipasi aktif. Dalam pendekatan ini sudah dicoba dikembangkan komunikasi dua arah, walaupun pada dasarnya masih berdasarkan pra anggapan yang sama dengan pendekatan yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal. Pendekatan ini sudah mulai membuka dialog, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas dari institusi eksternal. Salah satu contohnya adalah pendekatan pelatihan dan kunjungan.
- c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan. Pendekatan ini mirip kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam keterikatan tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat lokal dan apa yang harus dilaksanakan dan diberikan pihak eksternal. Masyarakat setempat, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat dan juga

pada pihak eksternal. Dalam model ini masyarakat setempat mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang telah disepakati dan mendapat dukungan dari pihak eksternal baik finansial maupun teknis. Keuntungan dari pendekatan ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sambil belajar dalam melakukan pengelolaan pembangunan. Keuntungan yang lain adalah dapat dilakukan modifikasi atas model yang disepakati sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

- d. Partisipasi atas permintaan setempat. Bentuk ini mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat. Kegiatan dan peranan pihak eksternal lebih bersifat menjawab kebutuhan yang diputuskan dan dinyatakan oleh masyarakat lokal, bukan kebutuhan berdasarkan program yang dirancang dari luar. Bagi pihak eksternal, dalam pendekatan ini tidak ada rancangan program dari luar yang harus dilaksanakan oleh masyarakat lokal, tidak ada target waktu, tidak ada target anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta yang lebih penting tidak ada sistem komando atau instruksi dari pihak eksternal kepada masyarakat. Dilihat dari pendekatan proses belajar sosial, pendekatan yang terakhir ini yang lebih sesuai dan banyak digunakan dalam praktik di lapangan. Sebagai salah satu contoh dalam pelaksanaan yang lebih teknis dan operasional dapat disebutkan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yang kemudian dikembangkan ke dalam pendekatan perencanaan yang partisipatif.

Dalam pendekatan tersebut sudah dikembangkan dan banyak dipraktekkan langkah-langkah dan teknis pendekatan yang lebih rinci. Kesemuanya itu merupakan

perwujudan dari proses belajar sosial.

2.1.5 Forum Antar *Stakeholders*

Mikkelsen (2015) Sebagaimana diketahui, proses pembangunan melibatkan tiga *stakeholders*: negara, swasta dan masyarakat. Unsur masyarakat dapat berupa masyarakat lokal atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari dimensi ruang, masyarakat lokal merupakan bagian dari perkembangan suatu kawasan tertentu. Oleh sebab itu, dapat dipahami adanya hubungan timbal-balik antara perkembangan masyarakat lokal dengan perkembangan suatu kawasan. Berbagai peluang pada tingkat regional dapat diantisipasi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lokal dan sebaliknya perkembangan masyarakat lokal juga sering memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan suatu kawasan. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam perencanaan dan pengelolaan perkembangan suatu kawasan, perlu juga melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu *stakeholder* di samping *stakeholders* lain. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat lokal tidak hanya terbatas pada lingkungan masyarakat lokal, tetapi juga dalam perkembangan lingkungan yang lebih luas, yaitu perkembangan kawasan.

Untuk maksud tersebut, dalam pengembangan suatu kawasan, dirasa perlu kehadiran suatu forum yang dapat memfasilitasi dan menjadi media interaksi antar *stakeholders*. Forum tersebut dapat terdiri dari unsur pemerintah, unsur swasta, unsur LSM dan masyarakat lokal. Berbagai aspirasi, kepentingan dan ide dapat diakomodasi dan didialogkan melalui forum tersebut, termasuk dalam merencanakan dan mengelola perkembangan kawasan yang bersangkutan. Hal ini sangat penting agar di kemudian hari tidak terjadi saling tuding apabila dalam perkembangan

kawasan tersebut ternyata mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan. Melalui keberadaan forum tersebut walaupun tidak harus dalam posisi yang bersifat formal, dapat dikembangkan tanggung jawab bersama baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun memetikkan manfaat. Dengan demikian, proses interaksi dan dialog dalam kesetaraan melalui forum tersebut akan dapat memenuhi prinsip bahwa: kontrol terhadap suatu pengambilan keputusan dan terhadap tindakan untuk melaksanakan keputusan tersebut harus ada pada pihak-pihak yang akan menanggung akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil. Pada dasarnya, walaupun dalam intensitas yang berbeda, akibat dari keputusan dan tindakan tadi akan dirasakan oleh semua *stakeholders* yang ada.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab bersama tadi adalah melalui forum tersebut dapat disepakati visi bersama dalam pengembangan kawasan yang bersangkutan yang kemudian dapat menjadi acuan bagi tindakan masing-masing *stakeholders*. Melalui forum tersebut juga dapat dirumuskan secara garis besar apa yang dapat dilakukan dan apa peranan yang dapat disumbangkan oleh masing-masing pihak dalam pengembangan kawasan. Bahkan melalui interaksi dan dialog dapat pula dikembangkan adanya jaringan antar *stakeholders* untuk bekerja sama dalam pengembangan kawasan dan menarik manfaat bersama dari pengembangan tersebut. Dengan demikian, dapat dijalin hubungan antar *stakeholders* yang bersifat sinergis. Dalam lingkup yang luas juga dapat dikembangkan jaringan hubungan saling menguntungkan dengan kawasan lain, maupun hubungan dengan kawasan dalam hierarki regional yang lebih tinggi. Dengan demikian forum ini juga dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi strategi *community based resource management* berupa

pengembangan jaringan. Dengan cara pengembangan jaringan ini diharapkan tidak saja dapat semakin dikembangkan hubungan sinergis antar *stakeholders*, tetapi juga antara sesama masyarakat lokal, bahkan antara masyarakat lokal dengan lingkungan yang lebih luas. Disamping dapat memperluas wawasan, pengembangan jaringan ini juga mempunyai keterkaitan dengan unsur pemberdayaan, karena jaringan yang semakin luas dapat berdampak pada semakin efektifnya kekuatan penekan dan semakin mapannya posisi tawar masyarakat lokal.

Apabila dilihat dari sisi yang lain, forum tersebut di samping dapat menjadi media untuk menjalin dan mengembangkan kerja sama dan hubungan yang bersifat sinergis antar pihak-pihak terkait, juga dapat menjadi media untuk menyelesaikan konflik yang sangat mungkin terjadi antar berbagai pihak terkait tadi. Apabila kawasan semakin berkembang, peluang ekonomis semakin besar, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang menjurus pada terjadinya konflik. Konflik yang muncul tidak hanya terbatas antar *stakeholders* dalam kawasan yang sama, tetapi dapat pula dengan kawasan lain yang setingkat atau dengan kawasan yang memiliki hierarki regional yang lebih tinggi.

2.2 Pengembangan Kawasan

Pembangunan ialah mengadakan, membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pengembangan ialah memajukan, memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Pembangunan dan pengembangan (*development*) dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan itu dapat merupakan pembangunan fisik atau pengembangan fisik, dan dapat merupakan pembangunan sosial dan ekonomi atau pengembangan sosial-ekonomi

(Johara, 2001).

Pengembangan (*development*) mengandung pengertian pemekaran (kuantitatif dan perbaikan (kualitatif), sedangkan pengertian kawasan, wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya; ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus (*Kamus Tata Ruang*, 2008).

Pengembangan kawasan atau wilayah mengandung pengertian arti yang luas, tetapi pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki taraf kesejahteraan hidup pada suatu wilayah tertentu. Tujuan pengembangan kawasan mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Disisi sosial ekonomis, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya penciptaan pusat- pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik, dan sebagainya. Disisi lain secara keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan. Alasan mengapa diperlukan upaya pengembangan pada suatu daerah tertentu, biasanya terkait dengan masalah ketidakseimbangan demografi, tingginya biaya produksi, penurunan taraf hidup masyarakat, ketertinggalan pembangunan, atau adanya kebutuhan yang sangat mendesak.

Dari definisi diatas terdapat beberapa kata kunci yang harus terdapat dalam pengembangan kawasan yaitu :

- a. Program yang menyeluruh dan terpadu;
- b. Sumberdaya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah cakupannya;

- c. Suatu wilayah tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan bahwa terdapat 3 klasifikasi bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu :

- a. Berdasarkan fungsinya dikenal adanya Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung;
- b. Berdasarkan aspek administrasinya dikenal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- c. Berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu (*anonym*).

Berdasarkan perkembangan serta kebutuhan pembangunan daerah, bentuk-bentuk perencanaan wilayah bertambah variasinya. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 (PP No. 26/2008) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), rincian rencana dikembangkan berdasarkan kepada skala prioritas ditetapkan Kawasan-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Dalam menunjang program-program kerjasama Sub-Regional, globalisasi, mengatasi krisis moneter (program *rescue* dan pemulihan) dibutuhkan pendekatan- pendekatan wilayah untuk mengikat program-program.

2.3 Pengertian Umum dan Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan

2.3.1 Pengertian Umum Agropolitan

Agropolitan terdiri dari kata *agro* dan *politan* (*polis*). *Agro* berarti pertanian

dan *politian* berarti kota, sehingga dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota yang terletak di dalam kawasan pertanian. Sehingga yang dimaksud dengan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan (agribisnis) dari wilayah sekitarnya.

Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan) (Mahi, 2014).

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Pengelolaan ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (*Urban-rural linkages*), dan menyeluruh hubungan yang bersifat interdependensi/timbale balik yang dinamis.

2.3.2 Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan

Ciri-ciri kawasan Agropolitan yang sedang berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Mahi, 2014)

- a. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis);
- b. Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan;
- c. Hubungan antara kota dan kawasan agropolitan bersifat interdependensi timbal balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan agropolitan mengemhangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*). Sedangkan kota menyediakan fasilitas, pelayanan untuk pengembangan usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, tel informnasi pengolahan hasil dan penampungan/pemasaran produk pertanian;
- d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di dalam kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.

Menurut Mahi (2014) suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan meliputi :

- a. Memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan), serta berpotensi atau lebih berkembang diversifikasi usaha dari komoditi unggulannya. Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian (*on-farm*) tetapi juga kegiatan *off farm*-nya; yaitu mulai pengadaan sarana dan prasarana pertanian (seperti benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alsin), kegiatan pengolahan hasil pertanian (seperti membuat produk olahan, produk makanan ringan/kripik, dodol, dan lain-lain) sampai dengan kegiatan pemasaran hasil pertanian (seperti bakulan, warung jual beli hasil pertanian, pasar lelang terminal/sub terminal agribisnis dan lain-lain) dan juga kegiatan penunjangnya (seperti pasae hasil agrowisata);
- b. Memiliki berbagai prasarana dan sarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisni, antara lain : Jalan, pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, seperti :
 - 1) Pasar, untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang gudang tempat penyimpanan dan prosessing hasil pertanian sebelum dipasarkan;
 - 2) Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal dan kegiatan agribisnis;

- 3) Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan Agribisnis (SPPA), kelembagaan petani di samping sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan kelembagaan petani/petani maju dengan petani di sekitarnya merupakan inti plasma dalam usaha agribisnis;
 - 4) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai klinik, konsultasi agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi balai penyuluhan pembangunan terpadu di mana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pembangunan kawasan agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti kontak tani/petani maju, tokoh masyarakat dan lain-lain;
 - 5) Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis, untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok di kawasan agropolitan;
 - 6) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian (agribisnis) yang efisien;
 - 7) Prasarana dan sarana agribisnis yang terdapat dalam kawasan agropolitan. Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai, seperti transportasi jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain;
- c. Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai

seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain;

- d. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin (Mahi, 2014).

2.4 ABCD (*Asset Based Community Development*)

2.4.1 Teori ABCD (*Assert Based Community Development*)

Teori *Asset Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh Jhon McKnight. Teori ini berasumsi bahwa yang dapat menjawab suatu problem masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan ini harus dimulai dari perbaikan modal sosial.

Sedangkan modal sosial (*social capital*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Adapun menurut Putnam, komponen modal sosial adalah terdiri dari suatu kepercayaan (*trust*), norma- norma (*norm*), dan jaringan-jaringan kerja (*networks*) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terorganisasi. Lebih lanjut Putnam mengatakan bahwa kerjasama akan mudah terjadi dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik, dan jaringan-jaringan antar warga (McKnight, 2010).

Menurut Kretzman (dalam Mcknight, 2010) percaya bahwa salah satu

masalah sentral dalam masyarakat adalah bahwa modal sosial telah rusak oleh profesionalisasi kepedulian dalam perencanaan dan layanan sistem. Lingkungan dan penduduk hanya dipandang sebagai obyek “yang membutuhkan” dan dipandang sebagai “masalah” yang harus diselesaikan.

Dalam *Action Strategies for community development* tentang konsep dari teori ABCD dimulai dari dua aspek, yakni *Neighborhood of Needs* (kebutuhan masyarakat sekitar) dan *Neighborhood of Asset* (aset masyarakat sekitar). Dalam arti setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan dan aset, begitu pula setiap masyarakat memiliki masalah namun disisi lain masyarakat juga memiliki potensi untuk mengatasinya.

Adapun langkah dalam pendekatan teori ABCD adalah mengidentifikasi dan mengintegrasikan aset lokal yang terdiri dari:

- a. Warga atau masyarakat sekitar, khususnya mereka yang biasanya terlihat sebagai “yang membutuhkan” dalam masyarakat, seperti anak muda, penyandang cacat, orang yang lemah pendapatan, dan mereka yang jauh dari kesejahteraan.
- b. Organisasi lokal baik yang formal atau informal seperti masjid, gereja, klub buku, tim olahraga dan klub rekreasi, layanan organisasi, kelompok mandiri, posko perawatan, dan lingkup pertemanan.
- c. Fasilitas yang ada di lingkungan sekitar baik dalam skala kota atau negara, organisasi seperti pusat medis, bank cabang, perpustakaan sekolah, fasilitas universitas, dan taman, termasuk publik dan lembaga swasta.

Ketiga aset lokal inilah yang akan diidentifikasi sehingga dapat diketahui tentang kebutuhan dan asetnya. Aset yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri yang nantinya akan menutupi kebutuhan dan masalah yang ada di dalam masyarakat (McKnight, 2010).

Setelah tiga aset lokal diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan tiga aset lokal ini secara maksimal, dengan cara produktif membangun hubungan untuk menghubungkan masyarakat lokal, lembaga, dan fasilitas. Hubungan yang dijalin pun harus saling menguntungkan bagi ketiga belah pihak.

2.4.2 Aset

Aset adalah kualitas berguna atau berharga, orang atau benda, sebuah keuntungan atau sumber daya. Sedangkan Kretzmann dan McKnight mendefinisikan aset sebagai hadiah, keterampilan dan kapasitas dari individu, asosiasi dan institusi (McKnight, 2010).

Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan anggota masyarakat. Penting untuk mengakui bahwa tidak hanya orang dewasa bagian dari persamaan modal manusia, tetapi anak-anak dan remaja juga berkontribusi.

Menurut Hidayatullah (2018) dalam *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset* menjelaskan bahwa aset juga meningkatkan sumber penghidupan (*livelihoods*) masyarakat. Dalam hal ini, *United Kingdom Departement for International Development* (DFID) mengidentifikasi adanya 5 (lima) aset dalam sumber penghidupan (*livelihoods*) yaitu:

- a. Aset Manusia: keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja dan pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam sumber penghidupan yang berbeda.
- b. Aset Finansial: sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat (seperti tabungan, pinjaman atau kredit, pengiriman uang, atau dana pensiun) untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka.
- c. Aset Sosial: sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka.
- d. Aset Fisik: infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-alat komunikasi) dan alat-alat produksi serta cara yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya.
- e. Aset Natural: persediaan sumber-sumber alam (seperti tanah, air, *biodiversifikasi*, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat).

Aset-aset yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh masyarakat sangat berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dalam proses pemberdayaan masyarakat peran aset manusia sangat mendukung keberlangsungan pengembangan atau pemberdayaan kapasitas atau kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas masyarakat harus memperhatikan atau memahami kondisi masyarakat termasuk aset-aset yang ada di dalamnya. Karena aset yang ada di dalam masyarakat dapat menjadi keunggulan yang dapat dikembangkan

untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya aset juga menjadi masalah atau kendala bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pemberdayaan masyarakat maka aset-aset yang belum ada dan penting bagi masyarakat penting untuk dikembangkan atau diciptakan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

2.4.3 Model Penerapan *Asset Based Community Development*

Menurut McKnight (2010) model penerapan *Asset Based Community Development* terdapat 5 penerapan sebagai berikut :

a. *Discovery* (Menemukan)

Menemukan kembali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau tidak disadari keberadaannya, menemukan kekuatan yang ada di dalam masyarakat bisa dilakukan dengan saling berbagi cerita, baik cerita yang menyenangkan, yang membanggakan, cerita keberhasilan maupun cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan. Cerita yang bisa membuat setiap orang saling menghargai satu sama lain dan menghargai beragam kekuatan aset-aset yang mereka miliki sebagai suatu komunitas. Cara ini akan membawa masyarakat pada pola-hubungan dan interaksi yang baru yaitu hubungan yang saling menghargai kekuatan dan saling berbagi.

b. *Dream* (Mimpi)

Mengajak masyarakat membayangkan mimpinya, membayangkan apa yang diinginkan. Mimpi tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk visual/gambar.

c. *Design* (Merancang/Merencanakan)

Dalam langkah ini perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada, agar bisa mewujudkan mimpi tersebut.

d. *Define* (Menentukan)

Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi mereka, menterjemahkannya, serta merancang secara bersama, maka inilah saatnya masyarakat menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal dan menentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk mewujudkan mimpi mereka. Dengan menyadari kekuatan yang mereka miliki, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.

2.5 Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas

2.5.1 Pengertian

Goulet dan Korten (dalam Artika, 2016) Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komunitas (*Community Based Resources Management*) merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya produktif.

Strategi ini mengarah pada penguatan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal. Melalui strategi ini setiap komunitas dapat mengembangkan sistem dan mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan sumber daya lokal antara lain berupa (tanah, air, informasi, teknologi, energi manusia dan kreativitas) yang

tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif.

Dari pengertian di atas, kinerja dari strategi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Komunitas dapat dilihat dari kemampuannya untuk melakukan mobilisasi sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, merata dan berkesinambungan guna memenuhi berbagai kebutuhan warga masyarakat.

Dalam, kenyataannya, setiap masyarakat, lebih-lebih pada tingkat lokal, memiliki perbedaan dilihat dari berbagai sudut, baik permasalahan, kebutuhan, potensi yang dapat dikembangkan maupun tingkat perkembangan sosial ekonominya.

Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas lebih mudah diorganisasikan berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara individual maupun kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat komunitas masih lebih kental dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kesadaran bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan.

2.5.2 Karakteristik Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas

2.5.2.1 Desentralisasi

Desentralisasi dilakukan dalam pengambilan keputusan yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, mulai dari identifikasi persoalan dan kebutuhan, penyusunan dan pengelolaan program. Strategi ini dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan swakelola, dalam pengertian masyarakat lokal mendapat peluang

yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan pendekatan sentralistis yang lebih menekankan pada sistem komando dan instruksi, di mana masyarakat lokal tinggal melaksanakan program yang sudah diputuskan dari atas secara terpusat.

Desentralisasi dalam pengambilan keputusan tidak dapat diartikan sebagai delegasi wewenang secara sederhana, tetapi juga menyangkut yang bersifat esensial terutama metode dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, walaupun pengambilan keputusan yang tadinya berada pada tingkat pusat sudah didelegasikan pada tingkat yang lebih rendah, metode dalam proses pengambilan keputusan masih sama, maka hal tersebut masih belum sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas. Dalam pendekatan ini metode pengambilan keputusan yang bersifat teknokratis yang didominasi para ahli dan tidak konsultatif harus diubah. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus benar-benar dikembalikan kepada rakyat sehingga akan lebih relevan dan akomodatif terhadap permasalahan dan kebutuhan lokal. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang lengkap, analisis para ahli bukannya tidak perlu, tetapi hanya sebagai salah satu dari berbagai masalah oleh berbagai partisipan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, desentralisasi perlu diikuti dengan perubahan metode dan mekanisme dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kewenangan kepada masyarakat. Karena, masyarakatlah yang secara langsung akan dipengaruhi dan menanggung akibat dari keputusan itu, bukannya para pemimpin lokal.

Membandingkan dengan pendekatan yang sentralistis, *top-down* dan

mengutamakan keseragaman, pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas ini memiliki beberapa hal yang lebih positif. Karena sifatnya yang tidak mengikuti pola yang baku, maka pendekatan ini lebih fleksibel, dalam pengertian pola yang digunakan akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat pada tingkat lokal memang memiliki kondisi, persoalan dan potensi yang berbeda. Dengan demikian, program-program yang diputuskan akan lebih relevan dan mampu mengakomodasi persoalan dan keputusan lokal. Bahkan, program-program tersebut bukan saja mengakomodasi kepentingan pemimpin dan elit lokal, melainkan juga kepentingan masyarakat pada tingkat bawah, karena masyarakat telah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dan, melalui pendekatan ini potensi dan sumber daya yang ada dapat lebih diaktualisasikan, karena pada dasarnya masyarakat lokal sendiri yang lebih tahu dan lebih mengenal berbagai potensi dan sumber daya yang ada di sekitarnya.

Terselenggaranya desentralisasi dalam bentuk swakelola dengan berbagai perubahan metode dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perlu difasilitasi dalam bentuk institusi sosial yang cukup mengakar dalam masyarakat yang bersangkutan. Institusi sosial yang dimaksud bukan hanya berupa kehadiran suatu organisasi atau lembaga formal, melainkan lebih sebagai suatu pola aktivitas yang sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Pola aktivitas bersama yang teraktualisasi dalam mekanisme baru tentang proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, agar cukup mapan dan mengakar, membutuhkan proses yang cukup panjang melalui institusionalisasi. Apabila proses institusionalisasi telah terjadi, pola aktivitas dan mekanisme tersebut

memiliki kapasitas untuk mendorong tindakan bersama, dan sebagai institusi yang sudah mengakar akan mampu bertahan dalam jangka panjang, sehingga lebih memungkinkan kesinambungan dan kemandirian proses pengelolaan pembangunan.

Kedua, pemberian kewenangan kepada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh kapasitas masyarakat. Pengelolaan dan control terhadap sumber daya menuntut adanya kapasitas masyarakat lokal itu sendiri untuk melakukannya. Kewenangan yang dimiliki tanpa disertai dengan kapasitas untuk melakukannya tidak akan memberikan hasil sesuai dengan diidealkan. Kapasitas yang dimaksud meliputi kapasitas dalam identifikasi persoalan dan kebutuhan, identifikasi sumber daya dan peluang, serta kapasitas pengelolaan sumber daya. Persoalan yang seringkali muncul adalah perbedaan persepsi dalam melakukan identifikasi, yang tidak jarang disebabkan karena perbedaan referensi dan kepentingan, misalnya antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Karena perbedaan ini, seringkali pihak pemerintah melalui aparat birokrasinya menilai apa yang diidentifikasi masyarakat lokal bukan daftar kebutuhan, melainkan daftar keinginan. Hal seperti itu yang sering dijadikan dalih untuk menilai bahwa masyarakat lokal belum memiliki kapasitas untuk melakukan identifikasi kebutuhan. Padahal, pendekatan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas justru berasumsi bahwa masyarakat lokal itu sendiri yang paling tahu apa yang menjadi persoalan dan kebutuhannya.

Ketiga, pada dasarnya desentralisasi mengandung makna pendelegasian wewenang kepada level yang lebih rendah, dalam hal ini kepada masyarakat lokal. Apabila dalam paradigma pembangunan konvensional wewenang dalam pengambilan

keputusan dilakukan secara terpusat, maka dengan paradigma yang berpusat pada rakyat, wewenang itu diberikan kepada masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah dalam memberikan wewenang tersebut, dalam pengertian pendelegasian sepenuh hati dengan keikhlasan. Pendelegasian wewenang sepenuh hati lebih mengandung makna secara esensial dan substansial, bukan semata prosedural. Dalam praktik pelaksanaan pembangunan masyarakat, tidak jarang dijumpai kehadiran institusi bentukan baru dari atas, yang secara formal diberi fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan memfasilitasi pengambilan keputusan dari bawah.

Kemauan politik untuk memberikan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, supaya tidak terkesan sekedar retorika, diperlukan perubahan visi dan sikap dari birokrasi pemerintah, termasuk aparatnya, terhadap masyarakat. Hubungan aparat dengan masyarakat bukan sebagai penguasa, melainkan lebih sebagai pihak yang memberikan pelayanan atau sebagai fasilitator. Dalam hal-hal tertentu, hubungannya tidak harus bersifat vertikal melainkan horizontal.

Dengan demikian, posisi pemerintah dan aparatnya tidak harus selalu sebagai pihak yang lebih tahu, lebih berkuasa dan lebih menguasai sumber daya dibandingkan masyarakat lokal. Perubahan visi dan sikap seperti itu bukan hal yang mudah, karena pendekatan sentralistis yang menempatkan birokrasi pemerintah beserta aparatnya pada posisi lebih tinggi dibanding masyarakat lokal sudah berlangsung cukup lama dan cukup mewarnai sikap serta pola berfikir aparat birokrasi.

2.5.2.2 Pemberdayaan

Menurut Korten (dalam Ratika, 2016) mengemukakan agar desentralisasi cukup efektif, diperlukan kondisi masyarakat yang memungkinkan untuk mengembang fungsi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, diperlukan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri. Untuk maksud tersebut di samping diperlukan peluang, kesempatan dan kewenangan juga kemampuan, yang kesemuanya memerlukan proses yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*). Dilihat dari aspek manusia sebagai aktor utama proses pembangunan, maka pemberdayaan juga dapat berarti proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia. Dalam kaitan dengan potensi manusia yang perlu diaktualisasikan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai harkat dan martabat manusia, di dalamnya terkandung tiga nilai yaitu kelestarian hidup, harga diri, dan kebebasan.

Menurut Goulet (dalam Ratika, 2016) menjelaskan untuk memahami proses pemberdayaan secara lebih proporsional, pengertian *power* sebagai kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan melalui tindakan dan pengambilan keputusan. Pembangunan itu sendiri dapat ditafsirkan sebagai upaya membangun *power* oleh suatu masyarakat, antara lain dalam bentuk peningkatan kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan. *Power* dapat digambarkan sebagai sumber daya dan hasil dari proses pembangunan itu sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, *power* dalam proses pembangunan dapat diartikan sebagai penguasaan atau control terhadap sumber daya, pengelolaan sumber daya dan hasil serta manfaat yang diperoleh.

Memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif, tetapi juga dari dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif justru lebih penting. Apabila mengikuti pandangan bahwa dalam proses pembangunan dikenal adanya tiga *stakeholders*, yaitu negara, swasta dan masyarakat, maka dalam paradigma pembangunan konvensional peranan negara paling dominan dibanding dua *stakeholders* yang lain (Ratika, 2016).

Menurut Efendi (2016) mengemukakan bahwa melalui proses tersebut pemerintah pusat tidak harus melepas semua kewenangannya dalam pengelolaan sumber alam, melainkan menyerahkan sebagian tanggung jawab dan kewenangannya kepada *stakeholders* yang lain, baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam penyediaan layanan serta dibutuhkan perubahan baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah. Pihak pemerintah direkomendasikan untuk melakukan dua hal yaitu mengubah skala prioritas pengelolaan oleh pemerintah dan membuat kinerja pemerintah lebih efisien melalui: desentralisasi kewenangan, meningkatkan kapasitas pemerintah melalui perumusan regulasi yang lebih responsif dan sensitif, meningkatkan koordinasi, meningkatkan usaha regionalisasi. Sementara perubahan dari pihak non pemerintah dilakukan melalui peningkatan peranan kelompok pengelola sumber daya, kelompok pelayanan petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari

proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat akan berarti mengurangi peranan pemerintah. Mengemukakan bahwa dibutuhkan beberapa prasyarat.

- a. Perubahan persepsi dan anggapan bahwa rakyat sebagai sekedar sumber informasi yang ikut menentukan pengambilan keputusan.
- b. Perubahan makna dan fungsi kekuasaan tidak hanya berarti hak untuk mengatur, tetapi juga membantu rakyat dalam memecahkan problema-problema pembangunan yang tidak dapat dipecahkan sendiri.
- c. Perubahan persepsi tentang sistem panutan yang seolah-olah rakyat tidak memiliki aspirasi dan pendapat sendiri di luar aspirasi dan pendapat panutan.
- d. Berangkat dari pemahaman bahwa desa-desa di Indonesia cukup beraneka ragam, sehingga tidak mungkin menggunakan pendekatan uniformitas.
- e. Kelompok miskin tidak lagi dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak produktif, karena walaupun miskin materi tetapi tidak miskin pengalaman pembangunan, jiwa kewiraswastan dan keterampilan teknis.

2.5.2.3 Proses Belajar Sosial

Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan komunitas merupakan proses interaksi antarwarga masyarakat dan interaksi terhadap lingkungannya. Melalui proses interaksi tersebut kemudian di samping melahirkan perilaku individu juga tindakan bersama untuk memenuhi tuntutan kehidupan bermasyarakat termasuk pemecahan berbagai persoalan yang timbul yang kemudian menjadi bagian dari institusi sosial yang merupakan pola aktivitas bersama dan berbagai bentuk pengetahuan serta kearifan lokal. Pengetahuan tersebut hidup dan berkembang di

daerah setempat walaupun tidak dapat diingkari mungkin sudah diperkaya, dipengaruhi, atau bahkan dirusak oleh pengetahuan dari luar. Chambers (dalam Ratika, 2016) menamakannya sebagai pengetahuan rakyat pedesaan, yang memberi tekanan pada pengetahuan milik rakyat yang jarang sekali dituangkan dalam tulisan. Pengertian tersebut mengacu pada seluruh sistem pengetahuan, termasuk konsep, kepercayaan dan persepsi, himpunan pengetahuan beserta proses perolehan, penambahan, penyimpanan dan penyebarannya. Sebagai contoh, melalui proses yang panjang suatu komunitas telah memiliki suatu sistem dan pola aktivitas yang mampu memelihara keseimbangan dengan lingkungannya. Proses belajar ini berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus bukan melalui jalur pendidikan form melainkan melalui pengalaman dalam kehidupan bersama. Proses belajar sosial ini merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas yang berorientasi pada perspektif *people center development*. Dijelaskan dalam aplikasinya ke dalam strategi Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komunitas, proses belajar sosial dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial di antara warga masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan masalah yang seringkali dilakukan melalui *trial and error*. Peningkatan kemampuan ini tidak dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui partisipasi dan interaksi dalam proses pengambilan keputusan dan aktivitas bersama untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Dengan demikian, strategi pembangunan yang memanfaatkan proses belajar sosial berarti juga telah memanfaatkan energi kreatif, pengetahuan dan kearifan yang

terdapat dalam masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya, proses belajar sosial tersebut tidak hanya berlaku bagi warga komunitas tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya pembangunan di tingkat komunitas tersebut baik dari pihak pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pihak-pihak dari luar komunitas tersebut harus belajar bersama-sama dengan warga komunitas atau masyarakat lokal untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan aktual, serta juga belajar bersama warga masyarakat lokal tentang bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi.

Faktor penghambat yang sering dijumpai bagi orang luar untuk belajar dari pengetahuan dan kearifan lokal adalah masih adanya kesenjangan komunikasi antara pihak eksternal tersebut dengan masyarakat, sehingga kurang mampu memahami kerangka berfikir masyarakat lokal. Kendala juga disebabkan oleh kenyataan, bahwa di satu sisi masih adanya prasangka bahwa masyarakat lokal khususnya masyarakat desa memiliki pengetahuan yang rendah sehingga masyarakat desa bukan sumber pengetahuan, sebaliknya di sisi yang lain masih adanya anggapan bahwa pihak luar yang lebih menguasai pengetahuan.

Oleh sebab itu, dalam proses belajar sosial, hubungan dan kedudukan antara dua pihak luar dengan masyarakat lokal tidak bersifat vertikal, melainkan horizontal karena pihak luar sekedar sebagai mitra atau dalam peranan sebagai fasilitator. Sebagai proses belajar bersama, mungkin saja terjadi hubungan timbale balik, bukan hanya pihak luar yang belajar dari masyarakat, melainkan masyarakat pun dapat belajar dari pihak luar.

Dalam hal ini, melalui proses belajar tersebut masyarakat belajar untuk memahami dan member makna bahwa ide dari luar tadi dapat member manfaat sehingga mereka dapat menerimanya. Sebaliknya, apabila dalam proses belajar sosial masyarakat tidak dapat member makna bahwa ide dari luar tersebut akan memberi manfaat dan memiliki nilai dalam kehidupan komunitas, maka masyarakat dapat pula menolaknya. Sudah tentu untuk sampai pada pemaknaan dan pemahaman tersebut dibutuhkan proses dialog yang bersifat satu arah. Dengan kata lain, agar terjadi proses saling belajar dan komunikasi dua arah perlu dimiliki sikap dan pandangan yang seimbang dan proporsional tentang pengetahuan lokal, dalam pengertian tidak menyanjungnya secara berlebihan dan sebaliknya juga tidak merendhkannya

Menurut Sjahrir (dalam Ratika, 2016) memberikan gambaran tentang hasil dari proses saling belajar tersebut, apabila pihak luar harus diposisikan sebagai pihak yang memberi bantuan kepada masyarakat lokal, maka dibutuhkan kesesuaian antara tiga komponen yaitu mereka yang dibantu, program yang dilaksanakan, dan organisasi pemberi bantuan. Secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program akan sangat ditentukan oleh kesesuaian atau relevansi antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, antara persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pemberi bantuan, antara kemampuan pengungkapan kebutuhan dari pihak penerima dengan proses pengambilan keputusan dari pihak pemberi bantuan. Karena, dalam pendekatan proses belajar, program-program pembangunan sekalipun berasal dari luar tetapi diusahakan agar tetap sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, hasil dari program yang dilaksanakan akan betul-betul dapat dirasakan oleh

masyarakat yang bersangkutan.

Tahap belajar efektif merupakan tahap awal, di mana beberapa orang dari lembaga pemerintah atau non pemerintah datang ke suatu desa atau masyarakat lokal, memahami permasalahan pembangunan dari perspektif masyarakat lokal, mencoba beberapa pendekatan untuk memecahkan persoalan dan memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi bersama. Dalam tahap ini dimungkinkan juga memperoleh dukungan sumber daya manusia dari luar yang memiliki keahlian tertentu sesuai kebutuhan.

Tahap belajar efisien merupakan tahap berikutnya, setelah diketahui apa yang harus dilaksanakan sesuai hasil tahap pertama. Tahap ini diarahkan pada proses belajar tentang bagaimana melaksanakan secara lebih efisien, meninggalkan cara-cara yang tidak produktif dan mengembangkan cara-cara sederhana untuk memecahkan persoalan operasional.

Tahap belajar mengembangkan diri dilakukan setelah pelembagaan dan penyusunan organisasi diselesaikan dalam tahap kedua. Dalam tahap ini perhatian lebih dicurahkan pada upaya perluasaannya yang meliputi pengembangan keahlian, sistem pengelolaan, struktur dan nilai-nilai pendukungnya. Dengan demikian, dalam tahap ini kapasitas masyarakat lokal sudah lebih berkembang sehingga sudah mempunyai kemampuan untuk mengelola aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan, terlepas ada tidaknya ada lembaga eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah yang melaksanakan program-programnya. Ketiga tahap tersebut merupakan abstraksi dari proses belajar sosial.

Memerhatikan seluruh uraian tentang proses belajar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prosesnya dapat terjadi dan dilakukan baik pada tingkat individu

warga masyarakat maupun pada tingkat komunitas. Pada tingkat individu warga masyarakat, melalui proses belajar tersebut akan menghasilkan kompetensi yang semakin meningkat yang berkaitan dengan proses pembangunan di lingkungan komunitasnya. Kompetensi tersebut dapat berupa rasa tanggung jawabnya terhadap pembangunan di lingkungan komunitasnya, tetapi dapat juga berupa kapasitasnya dalam melakukan identifikasi kebutuhan, sumber daya dan peluang, serta memanfaatkan sumber daya dan peluang tersebut. Pada tingkat komunitas, hasil proses belajar sosial adalah institusionalisasi dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal. Secara berkesinambungan dan kumulatif, institusi sosial akan semakin diperkaya dengan berbagai pola aktivitas bersama dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal. Aktivitas bersama yang semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, menunjukkan kapasitas masyarakat lokal yang semakin meningkat pula dalam mengelola pembangunan secara mandiri.

2.5.2.4 Keberlanjutan

Hasil dari proses belajar sosial adalah peningkatan kapasitas baik pada tingkat warga masyarakat maupun pada tingkat komunitas untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan komunitasnya secara lebih mandiri. Bentuk konkret dari kapasitas tersebut adalah adanya tindakan bersama pada tingkat lokal untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan memecahkan berbagai masalah. Apabila tindakan bersama tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan bersifat mandiri, maka dalam komunitas yang bersangkutan telah terjadi

keberlanjutan pembangunan atau *sustainability*.

Tindakan bersama yang berkesinambungan tersebut, dimungkinkan karena dalam masyarakat yang bersangkutan telah terjadi proses institusionalisasi, dengan demikian aktivitas membangun dan mengelola sumber daya secara mandiri tersebut sudah menjadi bagian dan terintegrasi ke dalam pola aktivitas bersama dalam komunitas. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa pembangunan masyarakat desa yang berkelanjutan hanya dapat berlangsung atas potensial sosial budaya masyarakat di desa yang bersangkutan, di mana masyarakat mampu mengambil keputusan tentang apa yang baik bagi kepentingan bersama. Untuk keberlanjutan tersebut perlu ada perubahan peranan pemimpin lokal, terutama pemimpin formal. Apabila sebelumnya sejak lama telah dibina untuk mendukung program dari atas sehingga mengurangi bobot fungsinya sebagai wakil rakyat yang memilihnya, maka pada masa sekarang dan masa datang harus siap untuk mendukung dan mengakomodasi aspirasi dari bawah melalui musyawarah desa. Kondisi yang menggambarkan masyarakat lokal merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri tadi dapat disebut dengan keberlanjutan sosial, yang didukung oleh keberadaan institusi sosial termasuk institusi kepemimpinan yang sudah mapan. Mengatakan bahwa pemberdayaan dapat melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian untuk ikut mendorong pemberdayaan.

Keberlanjutan sosial, ekonomi dan sumber alam yang menunjukkan adanya hubungan yang saling mendukung menjadi komponen dari pembangunan yang berkelanjutan. Ascher (dalam Ratika, 2016) menguraikan secara sederhana

pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memberikan manfaat kepada warga masyarakat dalam jangka panjang.

Dilihat dari ruang lingkup yang lebih luas, pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai upaya manusia untuk menghadapi perubahan. Disadari atau tidak, suka atau tidak, dirancang atau tidak, perubahan akan selalu dihadapi oleh manusia, baik perubahan pada diri manusia, baik perubahan pada diri manusia itu sendiri, pada lingkungannya yang meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial, maupun terutama pada perubahan tuntutan-tuntutannya agar dapat mempertahankan, menjaga bahkan meningkatkan kemampuan survivalnya dalam jangka panjang. Melihat bahwa kesejahteraan sosial merupakan dasar bagi keberlanjutan dalam jangka panjang tersebut. Untuk itu pada tingkat komunitas diperlukan hadirnya institusi yang dapat menjadi sarana untuk merancang dan melaksanakan aktivitas bersama guna memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, prasyarat terjadinya keberlanjutan atau kesinambungan adalah apabila aktivitas bersama dalam masyarakat lokal sudah cukup melembaga atau menjadi bagian dari pola perilaku masyarakatnya.

2.6 Kandungan Ayat AL-Qur'an

2.6.1 Kandungan Ayat AL-Qur'an Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat Islam yang menerangkan segala sesuatu yang ada dalam semesta ini. Kandungan ayat di bawah ini mencoba untuk menghubungkan tentang keterkaitan kandungan ayat Al-Qur'an pengembangan masyarakat yaitu Surah Al-Baqarah ayat 30 :

Terjemahannya :

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah ayat 30).

Ayat pada QS. Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai sebuah "planning/proyek/rencana" sang Khalik tidak mengambil keputusan sendiri Dia (Tuhan) mencontohkan kepada manusia untuk selalu "discussing/musyawarah", Allah SWT juga memberitahukan kepada manusia siapakah yang harusnya diajak untuk "discussing/musyawarah" dengan makna tersirat yang bisa kita dapatkan dari sifat makhluk yang diajak "discussing/musyawarah" oleh Tuhan yaitu malaikat. Bahwasannya malaikat ikut memiliki sifat suci, bersih, jujur dan segala kebaikan merupakan sifat dari malaikat sendiri. Jadi, sebagai manusia sudah seharusnya untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang benar. Seorang atau sekelompok partisipasi diajarkan oleh Al-Qur'an pada ayat ini adalah setelah membuat planning/proyek/rencana harus memiliki lokasi yang jelas.

2.6.2 Kandungan Ayat AL-Qur'an Terkait Dengan Agropolitan

Kandungan ayat di bawah ini mencoba untuk menghubungkan tentang keterkaitan kandungan ayat AL-Qur'an dengan pengembangan agropolitan yaitu Surah Lugman ayat 10 :

Terjemahannya :

“Dia menciptakan langit tanpa tiang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembangkan biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan, Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. “(QS. Al-Luqman 31:10).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tumbuhan-tumbuhan yang beranekaragam dan hewan adalah bukti adanya Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) yang menciptakan bumi beserta isinya sebagai aset/hadiah atau titipan dari Allah SWT yang seharusnya dijaga, dirawat dan dikembangkan serta dimanfaatkan juga digunakan manusia dalam hal ini masyarakat sebagai sumber penghidupannya. Agropolitan ini merupakan konsep yang digunakan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan dengan sebaik-baiknya melalui indentifikasi aset-aset yang ada di lokasi penelitian Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Efendi (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Srimartani	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Srimartani tidak berbanding lurus dengan penguasaan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Namun jika melihat jumlah total atas

		Kecamatan Piyungan Kabuapten Banten	penguasaan aset yang ada kelima aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Srimartani hamper semuanya mengalami peningkatan. Analisis hubungan antar krakteristik masyarakat terhadap tingkat partisipasi yang ada menunjukkan tidak adanya korelasi atau hubungan anatar karakteristik masyarakat terhadap tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pgram pengembangan kawsan agropolitan di Desa Srimartani.
2	Nur Ratika Syamsiar (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropilitan Berbasis ABCD (Asset Based Community Development) di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene	Hasil penelitian Masyarakat bersama-sama mengidentifikasi dan mengkaji potensi apa saja yang ada di Kecamatan Malunda atau aset-aset apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut, serta masyarakat bersama-sama mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya baik (sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain), dan juga mendiskusikan tentang peluang-peluang yang bisa didapatkan. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat Kecamatan Malunda selain dapat mengembangkan kawasannya, agar masyarakat juga mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik potensi maupun permasalahan yang ada di wilayahnya. Dan, dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.
3	Tripono Adi Prabowo(2014)	Analisis Strategi Pengembangan Kawasan	Hasil penelitian ini pemerintah diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang

		Agropolitan Kabupaten Nganjuk	rencana pengembangan agropolitan secara bertahap dan tepat sasaran. Mengingat bahwa keterlibatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung dalam strategi pengembangan kawasan agropolitan sangat penting. Sosialisasi dan edukasi tersebut diharapkan dapat membangun kultur agropolitan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan selanjutnya.
--	--	----------------------------------	--

Sumber : Identifikasi penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif dan kualitatif. Deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola deduksi. Pola deduksi bermula dengan pemaparan hal yang bersifat umum kemudian menyebarkan hal khusus. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak diawal paragraf. Paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum dan kemudian dilengkapi dengan penjelasa-penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti-bukti dan lain-lain. Karna paragraf deduktif dikembangkan dari suatu pernyataan umum, maka pola kalimatnya adalah dari umum ke kusus, Noor (2015) Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, Husaini (2009). Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Burhan (2005). Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kualitatif dalam penelitian ini mencakup tentang gambaran kondisi fisik wilayah penelitian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat skitar kawasan agropolitan Kecamatan Rambah Samo.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasa Agropolitan Berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*) di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu” termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antervariabel, yang didukung dengan menggunakan metode survey dalam pengumpulan data dan informasi yang diarahkan pada individu untuk memperoleh gambaran (deskripsi) nyata tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan agropolitan berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*) di wilayah Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Kecamatan Rambah Samo yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi penelitian ini

dengan didasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Kecamatan Rambah Samo di tetapkan sebagai lokasi Kawasan Agropolitan di dasarkan atas kritria yang ada serta berdasarkan arahan dari dokumen Rencana Program Inventasi Jangka Menegah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2019. Dan, karena sabagai besar masyarakat dikawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industry (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), dan jasa pelayanan. Selain itu, memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih selama 6 bulan, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2020.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu :

- a. Data Kuantitatif merupakan jenis data numerik atau berupa angka yang bisa langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan matematika.

Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kondisi fisik geografi wilayah penelitian.
2. Data Demografi wilayah penelitian.
3. Jumlah sarana dan prasna wilayah penelitian.

- b. Data Kualitatif merupakan jenis data yang berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan matematis tetapi dengan narasi dan hanya terbatas pada teknik pengolahan data seperti membaca grafik, tabel, gambar yang kemudian dilakukan penafsiran atau analisis.

3.4.2 Sumber Data

Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu :

- a. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, Burhan (2005) baik berupa hasil wawancara, kuisioner maupun observasi (survei lapangan).
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, Burhan (2005) dan melalui instansi-instansi yang terkait dengan objek penelitian baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan Rambah Samo, dan lainnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data penelitian ini dilakukan beberapa proses atau tindakan dalam pengumpulan data yaitu :

3.5.1 Kuisioner

Merupakan pertanyaan-pertanyaan atau daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner tersebut ialah bersifat tertutup dengan menggunakan pilihan jawaban

(Option) yang telah ditetapkan oleh penanya. Kuisisioner yang telah diberikan kepada responden atau masyarakat sehingga dari hasil pengisian kuisisioner maka akan didapatkan informasi yang diteliti (Husaini, 2009)

3.5.2 Observasi

Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung/survey lapangan pada lokasi penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi serta potensi wilayah yang diteliti.

3.5.3 Studi Pustaka

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumen berupa literature/referensi serupa, bahan seminar ataupun jurnal. Konsep-konsep teoritis dan operasional tentang ketentuan penelitian dan lain sebagainya, akan dapat peroleh dari kepustakaan.

3.5.4 Dokumen

Metode dokumen adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, buku, agenda. Metode ini digunakan untuk mencari data monografi Kecamatan Suangai Mandau dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

3.6 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian pada proses pengambilan data ialah :

- a. Kamera, yang digunakan untuk mendokumentasikan data hasil pengamatan.
- b. Alat tulis (Pena dan Buku), yang digunakan untuk mencatat dan menulis data.

- c. Penunjuk waktu, yang digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data.
- d. Leptop/computer yang digunakan untuk mengolah data.

3.7 Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Menurut Supranto (2000) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian sebagai pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.

3.7.1 Objek Fisik

Objek fisik dalam penelitian meliputi segala hal mengenai letak geografis suatu wilayah, luas wilayah, batas-batas administrasi wilayah, dan jumlah penduduk wilayah penelitian atau gambaran umum wilayah penelitian.

3.7.2 Objek Non-Fisik

Objek non-fisik dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek atau aset-aset yang ada di wilayah penelitian yaitu aset sosial, aset manusia, aset finansial, aset sarana dan prasarana, dan aset natural di dalam hasil indentifikasi wilayah penelitian.

3.8 Populasi dan Sampel

Dalam melaksanakan penelitian di lapangan dibutuhkan penentuan jumlah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi, populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat sekitar kawasan pertanian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling adalah salah satu teknik sampling non

random sampling dimana penelitian menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel yang dipilih oleh penelitian sebagai berikut :

a. Masyarakat

Masyarakat yang dipilih oleh peneliti ialah masyarakat yang mengerti agropolitan dan bertempat tinggal di kawasan pertanian. Sampel yang di ambil pada masyarakat 10 orang.

3.9 Metode Analisis Data

Menurut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Analisis deskriptif kuantitatif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*).
- b. Analisis SWOT adalah analisis kondidi internal maupun dasar enternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang stretegi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threaths*).

3.10 Teknik Analisis

Tekni analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun dasar eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*), Fladeo (2002) di mana analisis ini diterapkan untuk identifikasi partisipasi masyarakat terhadap aset pengembangan kawasan agropolitan adapun variabelnya yaitu aset manusia, aset finansial, aset sosial, aset fisik, aset natural.

b. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya, Burhan (2015) yang mana di terapkan dalam model ABCD (*Asset Based Community Development*) terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan dan mengidentifikasi peran pemerintah

untuk menyediakan prasarana sarana dasar yang cukup untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa.

3.11 Skala Pengukuran Instrumen

Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam suatu peneliti dapat berupa kuisisioner, sehingga skala pengukuran instrument adalah menentukan satuan yang diperoleh sekaligus jenis data atau tingkatan data.

3.12 Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang menjadikan faktor penelitian untuk diamati yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Warga/Masyarakat
 1. Aset Manusia;
 - Pendidikan;
 - Umur/Usia;
 - Jumlah Petani;
 - Jumlah Pengusaha;
 2. Aset Finansial.
 - Lembaga Keuangan
- b. Organisasi Lokal

1. Aset Sosial.

- Jumlah Kelompok Tani;
- Jumlah Pegawai Intansi Peemerintahan;

c. Fasilitas

1. Aset Fisik;

- Air Bersih
- Listrik;
- Peribadatan;
- Perdagangan dan Jasa (pasar,hotel,dan rumah makan/warung);
- Sarana Pendidikan.
- Jalan
- Irigasi

2. Aset Natural.

- Sungai;
- Objek/Daya Tarik Wisata;
- Pertanian dan Perkebunan;
- Peternakan;





Tabel 3.1 Variabel Penelitian

NO	Pembahasan	Variabel	Indikator	Analisis
1	Identifikasi aset lokal dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo	Warga/Masyarakat	a. Pendidikan	Deskriptif Kualitatif
		- Aset Manusia	b. Umur/Usia	
			c. Jumlah Petani	
	d. Jumlah Pengusaha			
- Aset Finansial	a. Lambaga Keuangan			
Organisasi Lokal	a. Jumlah Kelompok Tani			
- Aset Sosial	b. Jumlah Pegawai Intansi Pemerintah			

		<p>Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aset Fisik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Air Bersih b. Listrik c. Peribadatan d. Perdagangan dan jasa e. Sarana Pendidikan f. Jalan g. Irigasi 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Aset Natural 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sungai b. Objek/Daya Tarik Wisata c. Pertanian dan Perkebunan d. Peternak 	

2	<p>Identifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo</p>	<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan</p>	<p>a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan b. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pikiran/Ide c. Partisipasi Berdasarkan Tenaga d. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Sumbangan Finansial/Uang dan Meteri/Barang</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>
3	<p>Strategi menikatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis ABCD (<i>Asset Based Community Development</i>) di Kecamatan Rambah Samo</p>	<p>Internal Eksternal</p>	<p>b. Kekuatan c. Kelemahan a. Peluang b. Ancaman</p>	<p>SWOT</p>

4	Menerapkan model ABCD (<i>Asset Based Comunnity Developmet</i>) terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan	Masyarakat	a. <i>Discovery</i> (Menemukan) b. <i>Dream</i> (Mimpi) c. <i>Design</i> (Merancang/ Merencanakan) d. <i>Define</i> (Menentukan)	Deskriptif Kualitatif
---	--	------------	---	------------------------------

Sumber : Hasil Analisis, 2020

3.13 Definisi Operasional

- a. Agopolitan adalah kota pertanian yang tumbuh berkembang karena berjalannya sistim dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, mengelola kegiatan pembagunan pertanian di wilayah sekitarnya.
- b. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistim semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- c. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya atau suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.
- d. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menagani masalah,

- pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
- e. Pengembangan adalah memperbaiki atau meningkatkan atau memajukan sesuatu yang sudah ada.
 - f. Aset adalah kualitas berguna atau berharga, orang atau benda , sebuah keuntungan atau sumber daya.
 - g. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu meteri atau unsur tertentu dalam kehidupan.
 - h. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha.
 - i. Komunitas adalah sebuah kumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis dan saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta interaksi dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya.
 - j. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpilih, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, lingkungan, sarana dan prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
 - k. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjual produk dan/atau jasa pada pelanggan.
 - l. Pengolahan adalah mengerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak 1999, pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan meliputi 6 kelurahan dan 80 desa. Hingga sekarang Kabupaten Rokan Hulu sudah mempunyai 16 Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 139 desa.

Kabupaten Rokan Hulu yang beribukota di Pasir Pengaraian merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk. Kabupaten Rokan Hulu perkembangannya cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial yang ada didalamnya. Dalam upaya mengendalikan perkembangan yang terjadi maka perlu penataan ruang yang lebih jelas yang dapat menampung segala aspek kehidupan sehingga tercipta keseimbangan lingkungan yang nyaman bagi manusia dan makhluk hidup lain yang termasuk didalamnya. Kabupaten Rokan Hulu mengalami perkembangan fisik yang cepat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Fakta yang mendukung adalah bertambahnya jumlah fasilitas sarana dan prasarana, baik itu sarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, peribadatan dan prasarana seperti jalan, jembatan, drainase, listrik dan lain sebagainya.

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu dialiri oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang masih berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih dan budidaya ikan.

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bagun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujungbatu, Pegaran Tapah Darussalam dan Pendalin Koto. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu 666.410 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 88 Jiwa/km². Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pengaraian Sekitar 180 km dari Ibu kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru” Selain pasir pengaraian Kota penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujungbatu sebagai salah satu pusat perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan mengusung visi Kabupaten Rokan Hulu “Mengujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau tahun 2016 dalam rangka memenuhi visi Riau tahun 2020” Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan Tarif Ekonomi dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

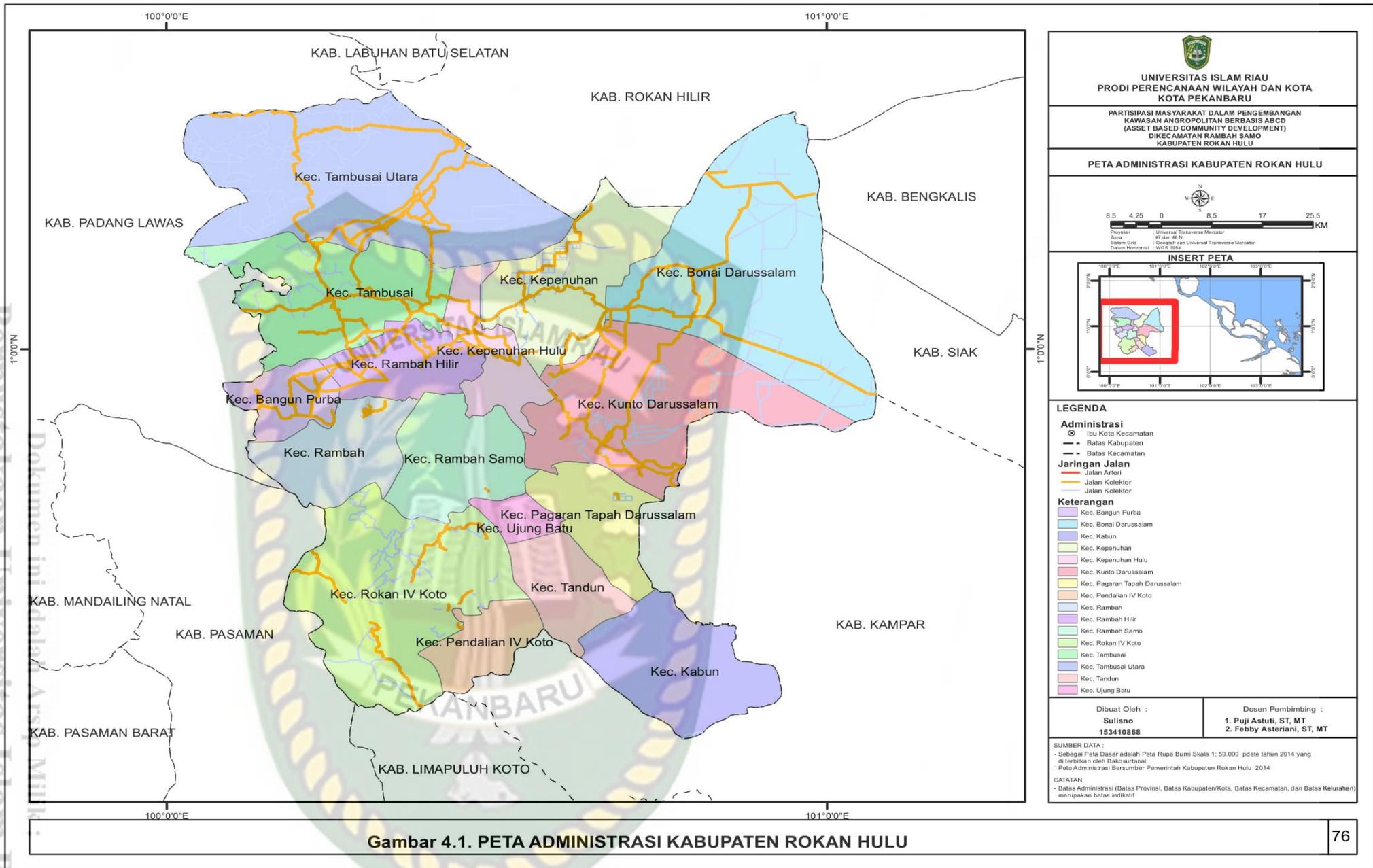
Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mendailing. Mata pencarian penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

Sebagi daerah agraris Kabupaten Rokan Hulu di dominasi oleh bidang pertanian terutama perkebunan dan industry pengolahan, oleh kerana itu perkebunan dapat menyerap tenaga kerja terutama buruh perkebunan yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang secara astronomis Kabupaten Rokan Hulu berada antara $00^{\circ} 25' 20''$ LU - $010^{\circ} 25' 41''$ LU dan $100^{\circ} 02' 56''$ - $100^{\circ} 56' 59''$ BT, Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- a. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat



Gambar 4.1. PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ROKAN HULU

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sekitar 7.588,13 km² yang dibagi kedalam 16 kecamatan. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Perentase (%)
1	Rokan IV Koto	932,90	12,29
2	Pendalian Koto	212,45	2,80
3	Tandun	315,79	4,16
4	Kabun	366,98	4,84
5	Ujung Batu	77,85	1,03
6	Rambah Samo	363,38	4,79
7	Rambah	334,12	4,40
8	Rambah Hilir	255,50	3,37
9	Bangun Purba	156,22	2,06
10	Tambusai	664,28	8,75
11	Tambusai Utara	1.220,92	16,09
12	Kepenuhan	273,17	3,60
13	Kepenuhan Hulu	465,10	6,13
14	Kuanto Darussalam	584,27	7,70
15	Pegaran Tampah Darussalam	151,78	2,00
16	Bonai Darussalam	1.213,53	15,99
Jumlah		7.588,13	100.00

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui kecamatan yang memiliki luas wilayah terluas adalah Kecamatan Tambusai Utara dengan persentase 16,09 % dan luas wilayah sebesar 1.220,92 Km², sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Ujung Batu dengan persentase 1.03 % dan luas wilayah sebesar

77,85 Km². Sedangkan luas di Kecamatan Rambah Samo yaitu 363,38 dengan perentase 4,79%.

4.1.2 Kondisi Fisik Kabupaten Rokan Hulu

4.1.2.1 Topografi

Kabupaten Rokan Hulu memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relative rendah di bagian Utara, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80% kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi 17,5%, dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih 1.000 meter meliputi 2,5% dari luas keseluruhan Kabupaten Rokan Hulu. Rata-rata ketinggian ada di Kecamatan Rambah Samo, sedangkan terendah ada di Kecamatan Bonai Darussalam.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

- a. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan air laut, tersebar di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pegaran Tapah, Kecamatan Tsndun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagai Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian Koto.
- b. Ketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan air laut terbesar dibagian utara yaitu disebagian kecil Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto.

- c. Ketinggian 1.000 meter diatas permukaan air laut terbesar disebagaian kecil Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto.

Sebagi besar kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hulu sekitar 0-8% mencakup hampir seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto. Sedangkan kemiringan lahan di Kecamatan Pendalian Koto dan Rokan IV Koto sekitar 8-40%.

4.1.2.2 Klimatologi

Klimatologi merupakan komponen kondisi fisik dasar yang menggambarkan mengenai iklim dan cuaca yang biasa terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperature maksimum rata-rata 32 °C-32 °C. Rata-rata suhu udara terdigin di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2016 terjadi di bulan Februari dan Desember (26,4 °C) dan terpanas terjadi di bulan Maret (28,8 °C). Sedangkan kelembaban udara tertinggi 99,0% (Desember), terendah 94,5% (Agustus), serta kecepatan angin tertinggi 9,68 knot (Maret) dan terendah 6,20 knot (Juni). Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari (370,3 mm³) dan terendah di bulan Agustus (41,1 mm³). Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi sebesar 16,1 (Februari, November) dan terendah 3,7 (Agustus).

4.1.2.3 Geologi

Pembahasan geologi berupa jenis, sebaran dan sifat fisik batuan/tanah, struktur geologi, dan geomorfologi, yaitu gambaran yang berkaitan dengan bentang alam dalam hubungannya dengan jenis batuan pembenukan.

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagai besar termasuk kedalam liputan Peta Geologi Bersistem Indonesia dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Skala 1 : 250.000 Lembar Dumai dan Bagansiapiapi. Sebagian lagi terliput kedalam empat lembar peta geologi, yaitu Lembar Pekanbaru, Lembar Lubuksikaping, Lembar Padang Sidempuan dan Sibolga dan Lembar Pemetangsiantar.

Daerah Rokan Hulu berada dicekungan Sumatra Tengah, yang mempunyai batuan dasar berumur pra tersier. Struktur geologi yang terdapat didaerah ini adalah berupa struktur antiklin, sinklin dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah dengan arah umum pulau Sumatera. Berdasarkan Peta Geologi Lembaran Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk, 1982 dalam Zulfikar dkk, 2011), wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki batuan tertua yaitu kelompok batuan metasedimen dan malihan yang termasuk kedalam formasi Kuantan (Puku) serta formasi Bohorok (Pub) berumur Permo A – Karbon.

4.1.2.4 Hidrologi

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Rokan bagian hulu dan hilir. Bagian hulu mempunyai panjang sekitar 100 Km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan dibagian hilir sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini diibagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kuantan Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan, Tambusai, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat terdapat di Kecamatan Rokan Hulu ini

sebagai masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

4.1.3 Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu

4.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 adalah 666.410 jiwa yang terbesar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu . Berikut Tabel 4.2 jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan persebaran kecamatan yaitu :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase %
1	Rokan IV Koto	932,90	25.297	3,80
2	Pendalian Koto	212,45	12.639	1,90
3	Tandun	315,79	32.993	4,95
4	Kabun	366,98	29.237	4,39
5	Ujung Batu	77,85	71.197	10,68
6	Rambah Samo	363,38	37.128	5,58
7	Rambah	334,12	56.041	8,41
8	Rambah Hilir	255,50	43.843	6,58
9	Bangun Purba	156,22	19.070	2,86
10	Tambusai	664,28	71.752	10,77
11	Tambusai Utara	1.220,92	108.812	16,33
12	Kepenuhan	273,17	30.781	4,62
13	Kepenuhan Hulu	465,10	20.659	3,10
14	Kuanto Darussalam	584,27	62.157	9,33

15	Pegaran Tampah Darussalam	151,78	18.342	2,75
16	Bonai Darussalam	1.213,53	26.372	3,96
Jumlah		7.588,13	666.410	100

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019

Pada Tabel 4.2 menjelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambusai Utara yaitu 108.812 jiwa dengan persentase 16,33 %, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pendalian Koto yaitu 12.639 jiwa dengan persentase 1,90 %. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Rambah Samo yaitu 37.128 jiwa dengan persentase 5,58%.

4.1.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu selama 8 Tahun terakhir (2010-2018) tercatat selalu mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya pembaguan yang saat ini sedang dilakukan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari Tahun 2010 - 2018 adalah 4,23 %.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2010 – 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Persentase %
		2010	2018	
1	Rokan IV Koto	20.406	25.297	2,72
2	Pendalian Koto	10.730	12.639	2,07
3	Tandun	25.931	32.993	3,06
4	Kabun	22.318	29.237	3,43
5	Ujung Batu	41.243	71.197	7,06
6	Rambah Samo	27.398	37.128	3,90
7	Rambah	41.648	56.041	3,78
8	Rambah Hilir	34.594	43.843	3,01
9	Bangun Purba	15.701	19.070	2,46

10	Tambusai	53.451	71.752	3,75
11	Tambusai Utara	74.501	108.812	4,85
12	Kepenuhan	20.680	30.781	5,10
13	Kepenuhan Hulu	15.757	20.659	3,44
14	Kuanto Darussalam	39.799	62.157	5,73
15	Pegaran Tampah Darussalam	14.772	18.342	2,74
16	Bonai Darussalam	19.567	26.372	3,80
Jumlah		478.496	666.410	4,23

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019

Pada Tahun 2010 – 2018 perkembangan penduduk menunjukkan tran positif (meningkat), kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ujung Batu (7,06 %), diikuti oleh Kecamatan Kunto Darussalam (5,73 %) dan kecamatan terendah adalah Kecamatan Pendalian Koto (2,07 %).

4.1.3.3 Pesebaran Penduduk

Pola distribusi penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang terdistribusi pada setiap kecamatan. Penyebaran penduduk relatif dipengaruhi oleh minat penduduk untuk bertempat tinggal dilokasi-lokasi yang relatif masih kosong, biaya kehidupan yang relatif rendah dan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Tabel 4.4 Persebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Rokan IV Koto	932,90	25.297	27
2	Pendalian Koto	212,45	12.639	59
3	Tandun	315,79	32.993	104
4	Kabun	366,98	29.237	80
5	Ujung Batu	77,85	71.197	915

6	Rambah Samo	363,38	37.128	102
7	Rambah	334,12	56.041	168
8	Rambah Hilir	255,50	43.843	172
9	Bangun Purba	156,22	19.070	122
10	Tambusai	664,28	71.752	108
11	Tambusai Utara	1.220,92	108.812	89
12	Kepenuhan	273,17	30.781	113
13	Kepenuhan Hulu	465,10	20.659	44
14	Kuanto Darussalam	584,27	62.157	106
15	Pegaran Tampah Darussalam	151,78	18.342	121
16	Bonai Darussalam	1.213,53	26.372	22
Jumlah		7.588,13	666.410	88

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019

Pada Tahun 2018 konsentrasi tertinggi penduduk adalah Kecamatan Ujung Batu yaitu 915 Km²/Jiwa, yang tertinggi kedua adalah Kecamatan Rambah Hilir yaitu 172 Km²/Jiwa sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Bonai Darussalam yaitu 22 Km²/Jiwa.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rambah Samo

Kecamatan Rambah Samo merupakan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah Samo yang beribukota di Rambah Samo. Dari segi jarak, desa terdekat ke pusat kabupaten adalah Desa Rambah Samo Barat yaitu 16 km, sedangkan desa terjauh adalah Desa Sungai Kuning sejauh 35 km, adapun jarak Kecamatan Rambah Samo ke ibukota Kabupaten Rokan Hulu yaitu 12 km dan jarak Kecamatan Rambah Samo ke ibukota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru” yaitu 180 km. Kecamatan Rambah Samo yang mana memiliki 14 Desa/Kelurahan dan 42 RW / 232 RT. Seluruh wilayah Kecamatan Rambah Samo bertopografi dataran

rendah, jika dilihat dari geografis Kecamatan Rambah Samo merupakan kecamatan yang tidak berbatasan dengan pantai, dengan ketinggian 70 - 90 m dari permukaan laut.

Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam kawasan strategis agropolitan yang terdapat dalam arahan RTRW Kabupaten Rokan Hulu.

4.2.1 Administrasi dan Letak Geografis

Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yang secara astronomis Kecamatan Rambah Samo berada antara $00^{\circ} 49' 55''$ LU - $010^{\circ} 25' 41''$ LU dan $100^{\circ} 22' 56''$ - $100^{\circ} 07''$ BT. Luas wilayah Kecamatan Rambah Samo 352.62 km^2 .

Adapun batas administrasi Kecamatan Rambah Samo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Rambah
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Kunto Darussalam

Kecamatan Rambah Samo memiliki 14 (Empat Belas) Desa/Kelurahan yaitu :

1. Rambah Samo Barat
2. Marga Mulya
3. Rambah Samo

4. Karya Mulya
5. Rambah Baru
6. Rambah Utama
7. Pasir Makmur
8. Masda Makmur
9. Langkitin
10. Lubuk Napal
11. Sungai Salak
12. Teluk Aur
13. Lubuk Bilang
14. Sungai Kuning

Tabel 4.5 Luas Kecamatan Rambah Samo Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Perentase (%)
1	Rambah Samo Barat	86,02	24,39
2	Marga Mulya	16,36	4,64
3	Rambah Samo	17,05	4,84
4	Karya Mulya	27,15	7,70
5	Rambah Baru	8,16	2,31
6	Rambah Utama	20,26	5,75
7	Pasir Makmur	14,59	4,14
8	Masda Makmur	7,34	2,08
9	Langkitin	8,58	2,43
10	Lubuk Napal	19,00	5,39
11	Sungai Salak	11,47	3,25
12	Teluk Aur	46,86	13,29

13	Lubuk Bilang	28,29	8,02
14	Sungai Kuning	41,49	11,77
Jumlah		352.62	100.00

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun, 2019

Bedasarkan Tabel 4.1 Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Rambah Samo yang memiliki luas tertinggi adalah pada Desa/Kelurahan Rambah Samo Barat dengan luas 86,02 Km². Dan luas terendah terletak di Desa/Kelurahan Masda Makmur dengan luas 7,34 Km².

4.2.2 Kependudukan Kecamatan Rambah Samo

4.2.2.1 Jumlah Penduduk

Pada akhir Tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Rambah Samo dihuni penduduk sebanyak 37.218 jiwa. Secara umum kondisi kependudukan di Kecamatan Rambah Samo dapat dilihat pada penjelasan Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Laki-Laki	Permpuan	Jumlah (Jiwa)
1	Rambah Samo Barat	86,02	2.586	2.514	5.100
2	Marga Mulya	16,36	1.227	1.122	2.349
3	Rambah Samo	17,05	1.272	1.279	2.551
4	Karya Mulya	27,15	1.350	1.249	2.599
5	Rambah Baru	8,16	1.419	1.271	2.690
6	Rambah Utama	20,26	1.772	1.714	3.486
7	Pasir Makmur	14,59	589	564	1.153
8	Masda Makmur	7,34	540	506	1.046

9	Langkitin	8,58	1.326	1.285	2.611
10	Lubuk Napal	19,00	844	838	1.682
11	Sungai Salak	11,47	583	564	1.147
12	Teluk Aur	46,86	2.118	1.884	4.002
13	Lubuk Bilang	28,29	911	841	1.752
14	Sungai Kuning	41,49	2.634	2.416	5.050
Jumlah		352.62	19.171	18.047	37.218

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun, 2019

Bedasarkan Tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan penduduk di Kecamatan Rambah Samo yaitu di Desa/Kelurahan Rambah Samo Barat merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni 5.100 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Desa/Kelurahan Masda Makmur degan jumlah 1.046 jiwa.

4.2.2.2 Kepadatan Penduduk

Dari Tabel 4.3 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa Desa/Kelurahan Rambah Baru memiliki kepadatan penduduk tertinggi 330 jiwa/Km², sedangkan kepadatan penduduk yang terendah yaitu 59 jiwa/Km² berada di Desa/Kelurahan Rambah Samo Barat degan luas 86,02 Km² dan jumlah penduduk 5.100 jiwa.

Tabel 4.7 Distrisbusi dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Rambah Samo Dirinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun, 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata	
					Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Anggota ART
1	Rambah Samo Barat	86,02	5.100	1.262	59	4
2	Marga Mulya	16,36	2.349	639	144	4

3	Rambah Samo	17,05	2.551	644	150	4
4	Karya Mulya	27,15	2.599	723	96	4
5	Rambah Baru	8,16	2.690	766	330	4
6	Rambah Utama	20,26	3.486	960	172	4
7	Pasir Makmur	14,59	1.153	334	79	3
8	Masda Makmur	7,34	1.046	287	143	4
9	Langkitin	8,58	2.611	636	304	4
10	Lubuk Napal	19,00	1.682	406	89	4
11	Sungai Salak	11,47	1.147	282	100	4
12	Teluk Aur	46,86	4.002	967	85	4
13	Lubuk Bilang	28,29	1.752	409	62	4
14	Sungai Kuning	41,49	5.050	1.215	122	4
Jumlah		352.62	37.218	9.530	106	4

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun, 2019

4.3 Kondisi Pertanian

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras, pembagunan pertanian yang telah di laksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, alih fungsi lahan tanaman pangan, belum optimalnya sistim perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih

rawannya ketahanan pangan dan energy, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antara sektor dan sub sektor terkait dalam pembangunan pertanian.



Gambar 4.2 Kondisi Pertanian di Desa Rambah Baru
Sumber : Hasil Survei Tahun 2020

4.4. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pada dasarnya kawasan peruntukan pertanian mencerminkan kawasan pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Peruntukan kawasan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu, dapat diklasifikasikan menjadi pertanian Tanaman Pangan dan pertanian lahan kering yang diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif sebagai tanaman pangan pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan serta pertanian lahan kering dan hortikultura di Kabupaten Rokan Hulu adalah 45.239,412 ha.

a. Kawasan Peruntukan Pertanian

Sebaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana

mencapai 12.843,18 ha. Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan menjadi seluas 12.951,038 ha meliputi Kecamatan Bonai Darussalam 3.272,44 ha, Kecamatan Rambah Samo 2.153,449 ha, diikuti oleh Kecamatan Rambah 1.521,956 ha.

Selain itu, kedepannya juga dicadangkan lahan untuk pertanian pangan untuk menjaga keberlanjutan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan untuk menjaga keberlanjutan pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 6.500 ha berada di Kecamatan Tambusai dengan luas kurang lebih 3.000 ha dan Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas Kurang lebih 3.500 ha.

b. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Hortikultura)

Untuk pengembangan pertanian lahan kering, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, dengan luas mencapai 32,288.374 ha. Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Bonai Darussalam merupakan kecamatan dengan luas rencana kawasan pertanian lahan kering terbesar, yaitu mencapai 5,714.218 ha untuk Kecamatan Rambah Samo dan 4,760.886 ha untuk Kecamatan Bonai Darussalam.

4.5 Program Pertanian Di Kecamatan Rambah Samo

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pertanian telah menggulirkan satu Program yang dinamakan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) untuk mencapai produksi beras sekitar 70 juta ton dan surplus 10 juta ton. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) yang diloncingkan Oleh Gubernur Riau melalui Balai Pengkajian Teknologi

Pertanian (BPTP) Riau berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu dan *International Rice Research Institute* (IRRI) diselenggarakan di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Dilakukan beberapa pengkajian di lapangan bersama petani untuk mendapatkan Teknologi Usaha Padi Spesifik Lokal. Inovasi Teknologi Padi yang tersedia saat ini adalah dalam bentuk Variabel, Pemupukan Hara Spesifik Lokasi, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sesuai prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang merupakan komponen dasar dari pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Selain itu, penggunaan bibit muda (< 21 Hari Setelah Samai), 1-3 batang bibit/lubang tanam, sistim tanaman jajar logowo, penggunaan bahan organik sekitar 2 ton/ha, pengairan berselang merupakan komponen pilihan dari pendekatan PTT.

Selain itu di laksanakan juga Program Pemupukan Hara Spesifik Lokal (PHSL) menggunakan WEBSITE dengan alamat <http://webapps.irri.org/nm/id/> yang secara langsung disampaikan oleh Kepala Perwakilan *International Rice Research Institute* (IRRI). Penentuan rekomendasi Pemupukan Hara Spesifik Lokal (PHSL) ini berguna untuk menentukan kebutuhan pupuk pada tanaman padi secara spesifik lokal baik untuk pupuk tunggal Urea, SP-36 atau TSP, dan KCI maupun pupuk mejemuk NPK. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan Penyuluhan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terkait kebutuhan pupuk dapat diketahui dan dihitung oleh para petani dengan tepat sehingga diperoleh efisiensi biaya untuk pembelian pupuk dalam rangka meningkatkan produksi padi dapat ditingkatkan di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi Aset Lokal Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo

5.1.1 Aset Manusia

Aset manusia yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, keterampilan, serta pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam penghidupannya dan erat kaitannya dengan pembahasan kawasan agropolitan di wilayah penelitian Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.1 Sebaran Tingkat Pendidikan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	SD	26	252	3.799
2	SMP	7	103	1.432
3	SMA	1	32	500
4	SMK	2	32	182
Jumlah		36	419	5.913

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.1 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah murid SD di Kecamatan Rambah Samo sebanyak 3.799 orang dan jumlah guru 252 orang dengan 26 sekolah, jumlah murid SMP di Kecamatan Rambah Samo sebanyak 1.432 orang dan jumlah guru 103 orang dengan 7 sekolah, jumlah murid SMA di Kecamatan Rambah Samo 500 orang dan jumlah guru 32 orang dengan 1 sekolah, jumlah murid SMK di Kecamatan Rambah Samo 182 orang dan jumlah guru 32 orang dengan 2 sekolah. Dengan demikian, dari hasil indentifikasi pada tingkat pendidikan Tabel 5.1 ini merupakan salah satu peluang atau aset yakni aset manusia dalam bidang pengetahuan yang terkini dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.2 Sebaran Kelompok Umur di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	2.158	2.108	4.266
2	5 – 9	2.128	2.134	4.262
3	10 – 14	2.036	2.077	4.111
4	15 – 19	1.862	1.813	3.675
5	20 – 24	1.736	1.237	2.973
6	25 – 29	1.788	1.375	3.163

7	30 – 34	1.181	1.287	2.468
8	35 – 39	1.161	1.157	2.318
9	40 – 44	1.047	937	1.984
10	45 – 49	913	804	1.717
11	50 – 54	793	692	1.485
12	55 - 59	753	656	1.409
13	60 - 64	644	554	1.198
14	65 – 69	609	137	746
15	70 – 74	189	104	293
16	75+	175	102	277
Jumlah		19.171	18.047	37.218

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.2 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018. Pada kelompok umur 0 – 4 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 4.266 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.158 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.108 orang, dan jumlah penduduk menurut umur yang terendah pada kelompok umur 75 tahun keatas sebanyak 277 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 175 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 102 orang. Dengan demikian, dari hasil indentifikasi pada tingkat umur Tabel 5.2 ini merupakan salah satu peluang atau aset yakni aset manusia dalam bidang umur yang terkini dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.3 Sebaran Jumlah Petani di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Petani (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Rambah Samo	5.719	37.218

Sumber : Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.3 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 jumlah petani di Kecamatan Rambah Samo sebesar 5.719 jiwa dari total penduduk sebesar 37.218 jiwa. Hal ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aset manusia dalam kemampuan untuk bekerja di Kecamatan Rambah Samo dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut, melihat banyaknya jumlah petani yang ada.

Tabel 5.4 Sebaran Jumlah Usaha di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Sektor/Jenis Usaha	Jumlah
1	Perdagangan	43
2	Industri Pertanian/Penggilingan Padi	62
3	Industri Kayu	12
4	Industri Gerabah	51

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.4 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 jumlah pengusaha pada sektor perdagangan sebanyak 43 dan industri pertanian/penggilingan padi sebanyak 62 yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan. Ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aset manusia dalam bidang keterampilan baik pada sektor industri pertanian maupun perdagangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Rambah Samo untuk pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut.

5.1.2 Aset Finansial

Aset finansial yang dimaksud dalam penelitian ini, terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo ialah sumber-sumber keuangan (lembaga Keuangan) yang digunakan oleh masyarakat untuk dapat memiliki sumber penghidupan yang cocok bagi masyarakat setempat.

Tabel 5.5 Sebaran Jumlah Lembaga Keuangan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Lembaga Keuangan	Jumlah
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.5 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 terdapat 1 bank di Kecamatan Rambah Samo, yakni BRI yang berada di Desa Rambah Samo Barat. Hal ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aset manusia dalam kemampuan untuk bekerja di Kecamatan Rambah Samo dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut, melihat adanya 1 lembaga keuangan.

5.1.3 Aset Sosial

Organisasi yang dimaksud yakni mengenai aset sosial yang ada pada wilayah Kecamatan Rambah Samo. Aset sosial yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sumber daya sosial untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan masyarakat yaitu dalam hal kelompok tani, koperasi dan jumlah pegawai pada instansi pemerintahan.

Tabel 5.6 Sebaran Kelompok Tani dan Petani Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Kelompok Tani	Petani
1	Rambah Samo Barat	15	262
2	Marga Mulya	10	439
3	Rambah Samo	15	644
4	Karya Mulya	15	523
5	Rambah Baru	24	966
6	Rambah Utama	7	260
7	Pasir Makmur	15	534
8	Masda Makmur	12	287
9	Langkitin	6	136
10	Lubuk Napal	8	206
11	Sungai Salak	11	282
12	Teluk Aur	14	467
13	Lubuk Bilang	12	409
14	Sungai Kuning	9	315
Jumlah		173	5.719

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.6 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 Desa Rambah Baru memiliki petani tertinggi sebanyak yaitu 966 jiwa dengan kelompok tani sebanyak yaitu 24 kelompok. Sedangkan, Desa Langkitin memiliki petani yang terendah sebanyak yaitu 136 jiwa dengan kelompok tani sebanyak yaitu 6 kelompok. Hal ini merupakan sebuah peluang atau potensi dan aset sosial yang dimiliki Kecamatan Rambah Samo dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut.

Tabel 5.7 Sebaran Pegawai Pada Intansi Dinas Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Intansi Dinas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
----	---------------	-----------	-----------	--------

		Tetap	Tidak Tetap	Tetap	Tidak Tetap	
1	Kantor Camat	16	10	4	11	41
2	Puskesmas	7	15	18	37	77
3	Kantor Urusan Agama	5	-	1	1	7
4	PLN	5	-	-	-	5
5	Badan Pusat Statistik	1	-	-	-	1
Jumlah		34	25	23	49	131

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.7 maka dapat diketahui bahwa di Kantor Camat memiliki pegawai tetap laki-laki terbanyak yaitu 16 orang dan terendah di BPS sebanyak 1 orang. Puskesmas juga memiliki pegawai laki-laki tidak tetap terbanyak 15 orang dan pegawai tidak tetap laki-laki terendah di Kantor Urusan Agama, PLN, BPS tidak memiliki pegawai sama sekali. Sedangkan pegawai tetap perempuan terbanyak di Puskesmas sebanyak yaitu 18 orang dan pegawai yang ter sedikit PLN dan BPS tidak memiliki pegawai perempuan sama sekali. Dan, pegawai Perempuan tidak tetap yang terbanyak di Puskesmas yaitu 37 orang dan pegawai perempuan tidak tetap yang terendah berada di Kantor Urusan Agama sebanyak yaitu 1 orang. Banyaknya jumlah pegawai yang berada dalam naungan instansi pemerintahan setempat juga merupakan aset sosial dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

5.1.4 Aset Fisik

Aset fisik dalam penelitian ini salah satunya infrastruktur dalam (air, energi listrik, fasilitas ibadah, dan lain-lain) yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya.

Tabel 5.8 Sebaran Jumlah Pelanggan Pada PDAM Rambah Samo Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pelanggan
1	Rambah Samo Barat	63
2	Rambah Samo	48

Sumber : PDAM Rokan Hulu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.8 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018, Kecamatan Rambah Samo memiliki dua Desa pelanggan PDAM yaitu Desa Ramabah Samo Barat memiliki 63 pelanggan yang terbanayak pada PDAM dan yang terendah pada Desa Rambah Samo 48 pelanggan. Dengan demikian, dari hasil indentifikasi pada pelangan PDAM Tabel 5.8 ini merupakan salah satu aset fisik yang harus di kembangkan dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.9 Sebaran Jumlah Langgan Pascabayar Listrik Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Langgan Pascabayar Listrik
1	Rambah Samo Barat	966
2	Marga Mulya	260
3	Rambah Samo	734
4	Karya Mulya	287
5	Rambah Baru	136
6	Rambah Utama	206
7	Pasir Makmur	282

8	Masda Makmur	487
9	Langkitin	409
10	Lubuk Napal	315
11	Sungai Salak	282
12	Teluk Aur	467
13	Lubuk Bilang	409
14	Sungai Kuning	315
Jumlah		6.718

Sumber : PLN Rokan Hulu Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.9 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 Desa Rambah Samo Barat memiliki langganan pascabayar listrik tertinggi sebesar 966, Desa Rambah Samo sebesar 734, Desa Masda Makmur sebesar 487 dan pascabayar listrik terendah pada Desa Rambah Baru sebesar 136. Hal ini merupakan sebuah peluang atau potensi dan aset fisik yang dimiliki Kecamatan Rambah Samo dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut.

Tabel 5.10 Sebaran Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Langger/Mushollah
1	Rambah Samo Barat	7	10
2	Marga Mulya	6	8
3	Rambah Samo	4	2
4	Karya Mulya	10	10
5	Rambah Baru	8	5
6	Rambah Utama	5	12
7	Pasir Makmur	2	6
8	Masda Makmur	3	4

9	Langkitin	2	3
10	Lubuk Napal	3	2
11	Sungai Salak	2	-
12	Teluk Aur	4	4
13	Lubuk Bilang	2	3
14	Sungai Kuning	3	6
Jumlah		61	75

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.10 maka dapat diketahui bahwa Tahun 2018 berdasarkan Desa/Kelurahan yang memiliki tempat ibadah masjid terbanyak yaitu Desa Karya Mulya dengan jumlah masjid sebanyak 10 masjid dan Desa Pasir Makmur, Langkitin, Sungai Salak, Lubuk Aur memiliki tempat ibadah masjid terendah masing-masing yaitu 2 masjid. Desa Rambah Utara memiliki Langgar/Mushollah yang terbanyak yaitu 12 Mushollah, Desa Rambah Samo Barat dan Desa Karya Mulya memiliki masing-masing 10 Mushollah. Sedangkan Desa Sungai Salak tidak memiliki mushollah sama sekali. Hal ini merupakan sebuah peluang atau potensi dan aset fisik yang dimiliki Kecamatan Rambah Samo dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut.

Tabel 5.11 Sebaran Jumlah Pasar Umum Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Pasar Umum
1	Rambah Samo Barat	1
2	Marga Mulya	1
3	Rambah Samo	1
4	Karya Mulya	-
5	Rambah Baru	1
6	Rambah Utama	1

7	Pasir Makmur	-
8	Masda Makmur	-
9	Langkitin	1
10	Lubuk Napal	-
11	Sungai Salak	1
12	Teluk Aur	-
13	Lubuk Bilang	-
14	Sungai Kuning	-
Jumlah		7

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.11 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 Kecamatan Rambah Samo memiliki masing-masing 1 pasar di Desa Rambah Samo Barat, Marga Mulya, Rambah Samo, Rambah Baru, Rambah Utama, Langkitin, Sungai Salak dengan total jumlah pasar sebanyak 7 pasar umum. Pasar umum yang di 7 desa di Kecamatan Rambah Samo merupakan suatu aset fisik serta fasilitas yang dapat digunakan masyarakat untuk menjual hasil-hasil produksi (sumber daya alam) yang ada di Kecamatan Rambah Samo sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat khususnya para petani di rambah samo.

Tabel 5.12 Sebaran Jumlah Hotel dan Rumah Makan/Warung di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Hotel	Rumah Makan/Warung
1	Rambah Samo	1	7

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.12 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 Kecamatan Rambah Samo memiliki 1 hotel dan rumah makan/warung sebanyak 7. Meskipun, Jumlah tersebut masih belum terlalu tinggi, tetapi ini merupakan suatu aset

yang harus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.13 Sebaran Jumlah Sekolah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA	SMK
1	Rambah Samo Barat	3	1	1	1
2	Marga Mulya	2	1	-	-
3	Rambah Samo	3	1	-	1
4	Karya Mulya	3	1	-	-
5	Rambah Baru	2	-	-	-
6	Rambah Utama	2	1	-	1
7	Pasir Makmur	1	-	-	-
8	Masda Makmur	1	-	-	-
9	Langkitin	1	-	-	-
10	Lubuk Napal	2	-	-	-
11	Sungai Salak	2	-	-	-
12	Teluk Aur	1	1	-	-
13	Lubuk Bilang	2	1	-	-
14	Sungai Kuning	1	-	-	-
Jumlah		26	7	1	3

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.13 maka dapat diketahui di Kecamatan Rambah Samo memiliki sarana pendidikan yang terbanyak yaitu sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 26 sekolah, dan sarana pendidikan yang tersedikit berada di sarana Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 sekolah. Banyaknya sekolah dasar yang tersebut sebagai fasilitas yang sudah ada merupakan aset, juga berkontribusi besar dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo. Mengingat, sumber daya alam yang sudah menjadi aset dapat lebih di kembangkan, jika sumber

daya manusia juga dapat terpenuhi secara merata dan memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 5.14 Jumlah Jalan Utama di Desa Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Permukaan Jalan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Semenisasi/Aspal	Tanah Diperkeras (Kerikil, Batu)
1	Rambah Samo Barat	1	1
2	Marga Mulya	1	1
3	Rambah Samo	1	1
4	Karya Mulya	1	1
5	Rambah Baru	1	1
6	Rambah Utama	1	1
7	Pasir Makmur	-	1
8	Masda Makmur	-	1
9	Langkitin	1	1
10	Lubuk Napal	-	1
11	Sungai Salak	1	1
12	Teluk Aur	1	1
13	Lubuk Bilang	1	1
14	Sungai Kuning	1	1
Jumlah		11	14

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.14 maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 ada 3 Desa yang belum tersentuh jalan semenisasi/aspal yang terdapat pada Desa Pasir Makmur, Masda Makmur dan Lubuk Napal. Sedangkan kondisi jalan tanah diperkeras seperti kerikil dan batu masih terdapat di setiap desa di Kecamatan Rambah Samo.



Sumber : Hasil Survey, 2020

Gambar 5.1 Kondisi Jalan Yang Belum di Semenisasi/Aspal di Desa Pasir Makmur

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah haruslah mampu membuat kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya pemerintah ialah perujutan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah daerah. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri. Berdasarkan Tabel 5.14 terdapat 3 desa yang belum tersentuh jalan semenisasi/aspal di Kecamatan Rambah Samo, di harapkan kebijakan pemerintah untu merencanakan pembaguan jalan berupa semenisasi/aspal di tiga desa tersebut untuk memajukan produksi dan jasa masyarakat setempat, khususnya dalam pengembangan kawasan agropolitan.

a. Saluran Irigasi

Untuk mengetahui kondisi saluran irigasi di Kecamatan Rambah Samo yang salah satunya di Desa Rambah Baru, bisa di lihat pada Gambar 5.2 berikut ini :



Sumber : Hasil Observasi Lapangan Tahun 2020

Gambar 5.2 Kondisi Saluran Irigasi di Desa Rambah Baru

Berdasarkan hasil dari observasi lapangan kondisi saluran irigasi masih kecil sehingga di perlukan pembesaran saluran irigasi oleh pemerintah setempat untuk di rencanakan dalam pembangunan guna untuk meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan kusus di aset fisik Desa Rambah Baru.

5.1.5 Aset Natural

Aset natural dalam penelitian ini yakni persediaan sumber-sumber alam (seperti tanah, air, dan lain-lain), sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat, salah satunya ialah sektor pertanian. Dimana sektor prtanian merupakan sektor nutama dalam pengembangan kawasan agropolitan dikerenakan mayoritas masyarakat kususnya di Desa Rambah

Baru memiliki sektor pertanian, dimana sektor pertanian merupakan pendapatan atau sektor perekonomian masyarakat setempat, dan sektor lain nya sektor pendukung dalam pengembangan kawasan agropolitan yaitu seperti aliran sungai yang mana untuk meningkatkan perairan pertanian dan perternak untuk meajukan sektor perternakan masyarakat Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.15 Jumlah Sungai Yang Melintasi Desa Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Sungai
1	Rambah Samo Barat	3
2	Marga Mulya	4
3	Rambah Samo	4
4	Karya Mulya	3
5	Rambah Baru	1
6	Rambah Utama	2
7	Pasir Makmur	1
8	Masda Makmur	1
9	Langkitin	1
10	Lubuk Napal	4
11	Sungai Salak	3
12	Teluk Aur	4
13	Lubuk Bilang	1
14	Sungai Kuning	1
Jumlah		33

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.15 maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rambah Samo memiliki sungai-sungai yang mengalir di wilayah admisistrasi sungai-sungai tersebut, adapun sungai terbanyak berada di Desa Marga Mulya, Rambah Samo, Lubuk Napal, Teluk Aur yang mana memiliki masing-masing sungai sebanyak yaitu 4 sungai dan sungai tersedikit berada di Desa Rambah Baru, Pasir Makmur, Masda

Makmur, Langkitin, Lubuk Bilang, Sungai Kuning memiliki masing-masing sungai sebanyak yaitu 1 sungai. Air yang mengalir sisungai tersebut membantu para petani atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam sektor pertanian (pengairan) maupun pengkonsumsiaannya serta aset ini dapat membantu dan erat kaitannya dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

Tabel 5.16 Jumlah Potensi Pertanian dan Perkebunan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Pertanian				Perkebunan	
		Padi Sawah	Padi Ladang	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Kelapa Sawit	Karet
1	Rambah Samo Barat	-	1	-	1	1	1
2	Marga Mulya	-	1	1	-	1	1
3	Rambah Samo	-	1	-	-	1	1
4	Karya Mulya	1	1	1	-	1	1
5	Rambah Baru	1	-	-	-	1	1
6	Rambah Utama	1	-	-	1	1	1
7	Pasir Makmur	1	1	-	-	1	1
8	Masda Makmur	1	1	1	-	1	1
9	Langkitin	-	1	-	-	1	1
10	Lubuk Napal	-	1	-	-	1	1
11	Sungai Salak	-	1	-	-	1	1
12	Teluk Aur	-	1	-	-	1	1
13	Lubuk Bilang	-	1	-	-	1	1
14	Sungai Kuning	-	-	-	-	1	1
Jumlah		5	11	3	2	14	14

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.16 maka dapat diketahui bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang berperan penting dalam roda perekonomian di Kecamatan Rambah Samo. Di setiap desa di Kecamatan Rambah Samo memiliki perkebunan

kelapa sawit dan karet sebanyak 14 desa. Pertanian di Kecamatan Rambag Samo memiliki beberapa potensi seperti padi sawah sebanyak 5 desa, sedangkan padi lading yang terbanyak di Kecamatan Rambah Samo sebanyak yaitu 11 desa, kacang tanah memiliki 3 desa dan yang tersedikit yaitu ubi kayu sebanyak yaitu 2 desa. Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu kecamatan yang berperan sebagai sektor produksi padi, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Hal ini merupakan sebuah peluang atau potensi dan aset natural yang dimiliki Kecamatan Rambah Samo dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut.

Tabel 5.17 Jumlah Potensi Ternak Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Perternakan		
		Sapi	Kambing	Ayam Pedaging
1	Rambah Samo Barat	-	1	1
2	Marga Mulya	1	1	-
3	Rambah Samo	-	1	1
4	Karya Mulya	1	1	-
5	Rambah Baru	1	1	-
6	Rambah Utama	1	1	-
7	Pasir Makmur	1	1	-
8	Masda Makmur	1	1	-
9	Langkitin	-	1	-
10	Lubuk Napal	-	1	-
11	Sungai Salak	1	1	-
12	Teluk Aur	-	-	-
13	Lubuk Bilang	-	-	-
14	Sungai Kuning	-	-	-
Jumlah		7	11	2

Sumber : Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 5.17 maka dapat diketahui potensi ternak yang terbanyak di Kecamatan Rambah Samo pada Tahun 2018 yaitu peternak kambing sebanyak 11 desa sedangkan sapi sebanyak 7 desa dan peternak yang sedikit yaitu ayam pedaging

sebanyak 2 desa. Jumlah tersebut belum terlalu tinggi, tetapi ini merupakan suatu aset yang harus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.

Dari hasil indentifikasi wilayah penelitian di Kecamatan Rambah Samo, maka dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki wilayah setempat berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan seperti pasar yang menjadi tempat untuk menjual hasil-hasil pertanian, lembaga keuangan, lembaga pertanian yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai, seperti jaringan listrik dan lain-lain, memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti pendidikan, sekolah dan lain-lain.

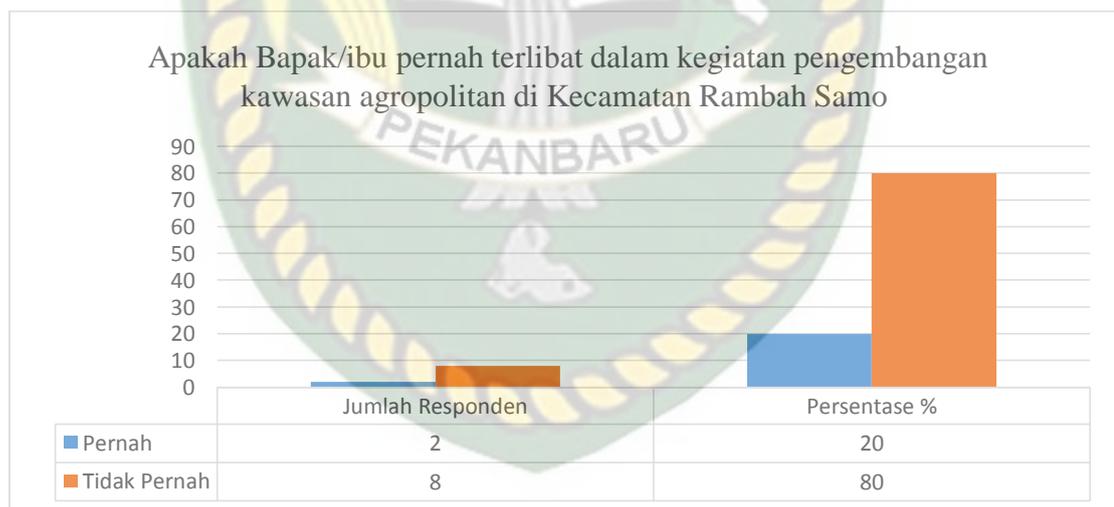
Aset yang dimiliki Kecamatan Rambah Samo hamper memadai dan hamper merata di setiap desa atau dengan kata lain cukup memadai, karena belum ada pengembangan yang berkelanjutan dan merata di setiap desa pada wilayah peneliti. Untuk dari itu di perlukan analisis untuk mengtauhi di mana kelemahan dan kekuatan dari suatu kawasan agropolitan ini untuk di kembangkan supaya masyarakat menjadi sejahtera degan dikembangkanya kawasan agropolitan dan pemerintah untuk mentidindaklanjuti dari hasil analisis ini supaya pemerintah bisa mempertimbangkan hasil analisis ini untuk di tindak lanjuti oleh permintah dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

5.2 Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Rambah Samo

Partisipasi masyarakat yang terdapat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo antara lain dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub-sub dibawah ini yang menjelaskan secara lengkap.

5.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Ramabah Samo ini masyarakat masih kurang ikut serta dalam pengembangan kawasan agropolitan. Tingkat partisipasi masyarakat ditinjau dari partisipasi dalam pengembangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut ini :



Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar 5.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pada Gambar 5.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo masih

dalam katagori tingkat partisipasi masih kurang, hal ini dilihat dalam bentuk persentase yang berjumlah 80% dari masyarakat yang mengatakan tidak pernah.

Hal ini terjadi karena masyarakat sebagian besar belum mengetahui dan memahami betapa pentingnya kawasan agropolitan untuk kehidupan masyarakat setempat karena kalau dikelola degan baik akan berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang menyatakan bahwa ada partisipasi masyarakat terhadap kawasan agropolitan sebanyak 20%.

5.2.2 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pikiran/Ide

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengembangan kawasan agropolitan yaitu dilakukan dengan pengukuran terhadap tingkat sumbangan yang diberikan masyarakat, berupa partisipasi pikiran atau ide-ide, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 5.18 berikut ini :

No	Pertanyaan	Jawaban Masyarakat Dalam Bentuk Persen (%)		
		Pernah	Tidak Pernah	Total
1	Apakah bapak/ibu pernah terlibat dalam musyawarah dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo?	40%	60%	100%
2	Apakah bapak/ibu pernah memberi saran atau pendapat dalam pertemuan musyawarah dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo?	30%	70%	100%

Tabel 5.18 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pikiran/Ide

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari indikator diatas diperoleh dari 10 responden, hanya 40% responden pernah terlibat langsung dalam musyawarah pengembangan kawasan agropolitan dan 60% menjawab tidak pernah. Sedangkan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan pendapat atau ide-ide hanya 30% , sedangkan 70% menyatakan tidak pernah yang berarti presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat musyawarah dan memberi pendapat masih rendah dibandingkan dengan presentase yang terlibat langsung.

5.2.3 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tenaga

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan yaitu di lakukan dengan pengukuran terhadap tingkat sumbangan yang diberikan masyarakat, berupa tingkat partisipasi tenaga, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 5.19 berikut ini :

No	Pertanyaan	Jawaban Masyarakat Dalam Bentuk Persen (%)		
		Pernah	Tidak Pernah	Total
1	Apakah bapak/ibu pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan gotong royong dalam upaya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo?	40%	60%	100%
2	Apakah bapak/ibu pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan di kawasan agropolitan Kecamatan Rambah Samo?	50%	50%	100%

Tabel 5.19 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tenaga

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.19 diatas diperoleh dari 10 responden, 40% dari total responden pernah terlibat langsung dalam keikutsertaan gotong royong dalam pembangunan sarana dan prasarana di kawasan agropolitan dan 60% menyatakan tidak pernah. Sedangkan untuk partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan di kawasan agropolitan 50% menyatakan pernah seperti upaya menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan alam dan 50% menyatakan tidak pernah. Dari Tabel 5.19 diatas dapat dilihat masih rendah partisipasi masyarakat dari sektor gotong royong untuk ikut dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Ramabah Samo.

5.2.4 Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Sumbangan Finansial/Uang dan Meteri/Barang

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan yaitu dilakukan dengan pengukuran terhadap tingkat sumbangan yang diberikan masyarakat, berupa tingkat partisipasi sumbangan finansial dan meteri, dapat dilihat pada Tabel 5.20 berikut ini :

Tabel 5.20 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Sumbangan Finansial

No	Pertanyaan	Jawaban Masyarakat Dalam Bentuk Persen (%)		
		Pernah	Tidak Pernah	Total
1	Apakah bapak/ibu pernah memberi sumbangan finansial atau uang guna membantu pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo?	10%	90%	100%
2	Apakah bapak/ibu pernah memberikan sumbangan meteri atau barang guna membantu pembaguan di kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo?	30%	70%	100%

dan Materi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.20 diatas diperoleh 10 responden, 10% dari total responden menyatakan partisipasi dalam memberi sumbangan finansial guna membantu pengembangan kawasan agropolitan dan 90% menyatakan tidak pernah. Sedangkan dari sumbangan meteri 30% yang menyatakan pernah dan 70% menyatakan tidak pernah. Dari sumbangan finansial dan meteri tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agopolitan masih sangat rendah.

5.3 Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*) di Kecamatan Rambah Samo

5.3.1 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil indentifikasi aset-aset yang sudah dimiliki Kecamatan Rambah Samo dengan data dari BPS ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menggunakan SWOT, yaitu indentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh faktor internal, serta peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, untuk melihat bagai mana dalam pengembangan kawasan agropolitan ini mejadi kawasan yang berkualitas dalam pengembangan kawasan agropolitan khususnya di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Hasil analisis SWOT kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo adalah sebagai berikut :

5.3.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Secara umum kawasan agropolitan memiliki kekuatan yang akan lajunya pengembangan kawasan dan sekaligus memiliki kelemahan yang dapat menghambat percepatan pengembangannya atau rencana pengembangan yang sudah disusun. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan sejak dini, diharapkan seluruh unsur terkait mampu mengantisipasi dan mengubah kekuatan menjadi peluang dan kelemahan menjadi tantangan yang harus diatasi.

Secara sistematis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kawasan agropolitan Kecamatan Rambah Samo adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.21 Analisis SWOT Lingkungan Internal (*Strength* dan *Weakness*)
 Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.**

	POSITIF	NEGATIF
	KEKUATAN	KELEMAHAN
I N T E R N A L	1) Memiliki sumberdaya manusia (aset manusia) yang cukup besar secara potensi dan distribusinya yang relatif merata. 2) Memiliki kelompok petani (aset sosial), petani yang tersebar pada setiap desa. 3) Tersedianya potensi perkebun yang cukup merata untuk pengembangan kawasan agropolitan (aset natural). 4) Memiliki fasilitas atau infrastruktur dasar yang cukup merata (aset fisik) 5) Adanya lembaga keuangan sebagai (aset finansial) untuk mendukung petani dan pengembangan kawasan agropolitan di wilayah setempat.	1) Kualitas sumberdaya manusia masih rendah, utamanya dalam usaha agribisnis. 2) Masih lemahnya potensi petani di Kecamatan Rambah Samo utamanya kacang tanah dan ubi kayu. 3) Kurangnya pemanfaatan potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo. 4) Kualitas sarana dan prasarana masih tergolong rendah dan belum merata. 5) Terbatasnya akses petani terhadap pemodal dan masih tingginya suku bunga usaha tani.

Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Pada sisi yang lain percepatan pengembangan kawasan agropolitan akan terjadi jika seluruh unsur terkait dapat memanfaatkan semua peluang (*opportunity*) yang ada dan mengatasi semua tantangan (*theat*) yang dapat menghambat dan melemahkan semangat pengembangan kawasan menuju kemandirian. Secara sistematis dan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan kawasan agropolitan pada umumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.22 Analisis SWOT Lingkungan Eksternal (*Opportunity*) dan (*Threat*) Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo

	PELUANG	ANCAMAN
E K S T E R N A L	1) Adanya peningkatan sumberdaya manusia di Kecamatan Rambah Samo untuk pengembangan kawasan agropolitan. 2) Adanya program pertanian untuk mendapatkan teknologi usaha padi spesifik lokal di Kecamatan Rambah Samo. 3) Adanya pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Rambah Samo. 4) Adanya pihak swasta yang memotivasi/mendorong peningkatan kualitas fasilitas atau infrastruktur dasar dalam rangka persaingan. 5) Adanya kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak swasta yang memberi akses dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha/pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.	1) Tingkat persaingan antar produk semakin tinggi. 2) Masih rawannya ketahanan pangan di Kecamatan Rambah Samo. 3) Adanyanya alih fungsi lahan di Kecamatan Rambah Samo. 4) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang lebih mumpuni. 5) Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Setelah melakukan pendekatan dan mendeteksi potensi/analisis lingkungan internal dan eksternal. Berikutnya adalah membuat matriks SWOT dari analisis SWOT kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. di atas :

Tabel 5.23 Matriks SWOT Kawasan Agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

	Strength (Kekuatan)		Weakness (Kelemahan)	
INTERNAL	1	Memiliki sumberdaya manusia (aset manusia) yang cukup besar secara potensial dan distribusinya yang relatif merata.	1	Kualitas sumberdaya manusia masih rendah, utamanya dalam usaha agribisnis.
	2	Memiliki kelompok petani (aset sosial), petani yang tersebar pada setiap desa.	2	Masih lemahnya potensi petani di Kecamatan Rambah Samo untuk pengembangan kawasan agropolitan
	3	Tersedianya potensi perkebun yang cukup merata untuk pengembangan kawasan agropolitan (aset natural).	3	Kurangnya pemanfaatan potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.
EKSTERNAL	4	Memiliki fasilitas atau infrastruktur dasar yang sudah cukup merata (aset fisik).	4	Kualitas sarana dan prasarana masih tergolong rendah dan belum merata.
	5	Adanya lembaga keuangan sebagai (aset finansial) untuk mendukung petani dan	5	Terbatasnya akses petani terhadap pemodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani.

		pengembangan kawasan agropolitan di wilayah setempat.		
--	--	---	--	--

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Opportunity (Peluang)		Strategi OS (Ada peluang besar dari eksternal dan ada kekuatan dari dalam)		Strategi OW (Ada peluang besar dari luar, namun internal terdapat kelemahan)	
1	Adanya peningkatan sumberdaya manusia di Kecamatan Rambah Samo untuk pengembangan kawasan agropolitan.	1	$O_2 - S_2$ Penerapan program pertanian Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.	1	$O_1 - W_1$ Lembaga penyuluh memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM di Kecamatan Rambah Samo.
2	Adanya program pertanian untuk mendapatkan teknologi usaha padi spesifik lokal di Kecamatan Rambah Samo.	2	$O_3 - S_1$ Pemerdayaan sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan tanaman pangan dan pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.	2	$O_3 - W_3$ Program pemberian bibit untuk memanfaatkan lahan yang sudah ada di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
3	Adanya pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Rambah Samo.				
4	Adanya pihak swasta yang memotivasi/mendorong peningkatan kualitas fasilitas atau infrastruktur dasar dalam rangka persaingan.	3	$O_5 - S_5$ Pembukaan akses pasar agropolitan dan mengembangkan kemitraan khususnya dengan pihak swasta	3	$O_5 - W_5$ Program perbankan syariah masuk Kecamatan/Desa.
5	Adanya kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak swasta				

	yang memberi akses dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha/ pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.				
--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Threat (Ancaman)		Strategi TS (Ada ancaman dari luar, namun dari internal terdapat kekuatan)		Strategi TW (Ada ancaman dari luar disisi lain secara internal masih sangat lemah)	
1	Tingkat persaingan antar produk semakin tinggi.	1	T ₁ -S ₅ Meningkatkan kreatifan, menambah modal dan meningkatkan pemasaran.	1	T ₃ -W ₃ Mengoptimalkan fungsi lahan secara baik di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
2	Masih rawannya ketahanan pangan di Kecamatan Rambah Samo.	2	T ₂ -S ₂ Meningkatkan kualitas perawatan pertanian di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.	2	T ₁ -W ₁ Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing dalam meningkatkan persaingan produk dan usaha agrobisnis di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
3	Adanyanya alih fungsi lahan di Kecamatan Rambah Samo.				
4	Terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang lebih mumpuni.	3	T ₄ -S ₄ Pemerintah memberikan pemerataan ketersediaan infrastruktur di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.	3	T ₄ -W ₄ Pemerintah memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
5	Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.				

Sumber : Hasil Analisis, 2020

5.3.2 Model Penerapan *Asset Based Community Development* Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan teori-teori, hasil identifikasi aset-aset yang ada di Kecamatan Rambah Samo dan hasil analisis matriks SWOT, maka model penerapan *Asset Based Community Development* dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dapat dijalankan dengan 4 langkah-langkah sebagai berikut :

5.3.2.1 *Discovery* (Menemukan)

Menemukan kembali kekuatan-kekuatan (aset-aset) yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau tidak disadari keberadaannya, menemukan kekuatan yang ada di dalam masyarakat bisa dilakukan dengan saling berbagi cerita, baik cerita yang menyenangkan, yang membanggakan, cerita keberhasilan maupun cerita tentang hal-hal yang pernah dilakukan. Cerita yang bisa membuat setiap orang saling menghargai satu sama lain dan menghargai beragam kekuatan (aset-aset) yang mereka miliki sebagai suatu komunitas. Cara ini akan membawa masyarakat pada pola-hubungan dan interaksi yang baru yang hubungan yang saling menghargai kekuatan dan saling berbagi. Yang dimaksud *Discovery* dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Penyadaran, fakta yang terjadi dilapangan bahwa masih banyak warga atau sebagai besar masyarakat diwilayah penelitian, yang belum mengtauhi bahwa Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu Kecamatan sebagai Kawasan Agropolitan, padahal sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan memiliki aset atau potensi yang sudah ada dan dapat dikembangkan, tetapi masyarakatnya belum menyadari tentang hal tersebut, penyadaran tersebut tentu menjadi poin penting untuk mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kawasan agropolitan diwilayahnya yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya” baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Termasuk didalamnya kegiatan penyuluhan dan membahas suatu masalah tertentu bersifat kualitatif dan dinamis, karena sifatnya tidak pasti, berupaeksporasi atau pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat digeneralisasi.
- b. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat lokal.
- c. Menunjukkan adanya masalah yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan : sumberdaya (alam, manusia, sarana-perasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisisk/teknis, sosial-budaya dan politis.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembanhkan kawasan agropolitan masih tergolong rendah diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan.

5.3.2.2 *Dream* (Mimpi)

Mengajak masyarakat membayangkan mimpinya, membayangkan apa yang diinginkan. Mimpi tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk visual/gambar. Yang dimaksud *Dream* dalam penelitian ini iyalah seagai berikut :

- a. Menumbuhkan keinginan atau dengan kata lain “mimpi” pada diri masyarakat untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo.
- b. Setiap masyarakat pasti memiliki mimpi atau keinginan untuk mengembangkan dirinya secara individu maupun secara berkelompok/komunikasi sama halnya yang terjadi di Kecamatan Rambah Samo, sebagian besar masyarakatnya mempunyai keinginan atau mimpi untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Karena, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Hal yang dapat dilakukan iyalah menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropitan demi terwujudnya perubahan perbaikan yang diharapkan di Kecamatan Rambah Samo.
- c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan Pengembangan Berbasis Partisipasi yang dapat memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.

- d. Meningkatkan peran dan kesetiaan pada kegiatan Pengembangan Berbasis Partisipasi yang ditunjukkan dengan motivasi-motivasi untuk pengembangan wilayah kawasan agropolitan.

5.3.2.3 *Design* (Merancang/Merencanakan)

Dalam langkah ini perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada, agar kita bisa mewujudkan mimpi tersebut. Yang dimaksud *Desin* dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Bersama-sama mengidentifikasi dan mengkaji potensi apa saja yang ada di Kecamatan Rambah Samo atau aset-aset apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut, serta masyarakat bersama-sama mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya baik (sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain) dan juga mendiskusikan tentang peluang-peluang yang bisa didapatkan. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat Kecamatan Rambah Samo selain dapat mengembangkan kawasannya, agar masyarakat juga mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik potensi maupun permasalahan yang ada di wilayahnya. Dan, dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian dan indentifikasi peneliti meliputi: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

kawasan agropolitan berdasarkan dari pemikiran/ide, tenaga, sumbangan finansial/uang dan meteri/barang, penerapan program pertanian, pemerdayaan sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan tanaman pangan dan pengembangan pertanian lahan kering, pembukaan akses pasar agropolitan dan pengembangan kemitraan khususnya dengan pihak swasta, lembaga penyuluh memberikan pelatihan kepada masyarakat, program pemberian bibit, program perbankan syariah, meningkatkan kreatif menambah modal dan meningkatkan pemasaran, meningkatkan kualitas perawatan pertanian, pemerintah memberikan pemerataan infrastruktur, mengoktimalkan fungsi lahan, meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur. Dan menganalisa masalah-masalah yang ada, indentifikasi pemecahan masalah, indentifikasi sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya) yang tersedia, pengorganisasian pelaksanaan dan memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif agar prosesnya berjalan dengan tujuannya.

5.3.2.4 Define (Menentukan)

Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi mereka, menterjemahkannya, serta merancang secara bersama, maka inilah saatnya masyarakat menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal dan menentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut yang mereka miliki, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.

- a. Dalam pelaksanaan partisipasi dalam pengembangan jika dilakukan dengan proses yang baik, maka itu berbanding lurus dengan pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya, kaitanya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan proses akuntabilitas publick dan penguatan kapasitas lokal.
- b. Secara langsung maupun tidak langsung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Rambah Samo dapat ikut mengalami perkembangan, meskipun tidak serta-merta dapat terlihat dengan waktu yang singkat.

Berdasarkan ke-4 langkah-langkah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat sudah menjalankan ke 4 hal diatas, maka sangat besar peluang masyarakat di Kecamatan Rambah Samo untuk dapat lebih mengembangkan diri secara individu maupun kelompok/komunitas dan aset-aset yang sudah tersedia bisa ikut berkembang dan berdampak positif pada perekonomian masyarakatnya dan khusus dalam pengembangan kawasan agropolitan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

- a. Aset lokal dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo yaitu 1.Warga/masyarakat pada aset manusia tingkat pendidikan terdapat kekurangan pada jumlah guru yang belum optimal, pada aset finansial terdapat satu lembaga keuangan 2.Organisasi pada aset sosial sebaran kelompok tani dan petani tersebar di setiap desa/kelurahan. 3.Fasilitas pada aset fisik sebaran jumlah pelanggan PDAM belum merata di setiap desa/kelurahan, sebaran tempat ibadah pada Desa Lubuk Napal belum ada mushollah, belum ada pasar agropolitan, kekurangan sarana di tingkat SMA, sarana jalan yang belum di semenisasi dan saluran irigasi yang masih kecil, pada aset natural jumlah potensi pertanian yang belum merata di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Rambah Samo.

- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo dalam katagori tingkat partisipasi masih kurang, hal ini dilihat dalam bentuk persentase yang berjumlah 80% dari masyarakat yang mengatakan tidak pernah berpartisipasi dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat degan analisis SWOT dan model penerapan ABCD (*Asset Based Community Development*) 1.Memaksimalkan potensi pertanian (sumber daya alam) di wilayah setempat. 2.Meningkatkan serta membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan agropolitan. 3.Meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat. 4.Mengembangkan kemandirian masyarakatnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagi tindak lanjut dari hasil peneliti terdapat beberapa saran peneliti adalah sebagi berikut :

- a. Kepada seluruh masyarakat di kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu mengembangkan aset – aset yang sudah dimilikinya serta mampu mengembangkan mutu sumber daya manusia baik dari bantuan pemerintah setempat maupun melalui non pemerintah secara berkelanjutan.
- b. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan mampu mengembangkan kawasan agropolitan di Kecamatan Rambah Samo dengan model penerapan Asset Based Communtiy Development dan memaksimalkan potensi pertanian (sumber daya alam) di wilayah setempat, juga meningkatkan

kemandirian masyarakatnya dan membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan agropolitan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”* Rineka Cipta, Jakarta
- Angell, dkk. 2008 *“Pengembangan Partisipasi Masyarakat ”*. Jakarta: Depdikbud
- Arief Rahman, 2018, *“Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al-Qur’an Surah Al-Lugman ayat 10
- Al-Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 30
- Burhan, dkk. 2005. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*. Kencana Jl. Tamba Raya No. 23 Rawamangun. Jakarta 13220
- Badan Pusat Statistik, 2020. *“Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2019”*
Rokan Hulu : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
- Badan Pusat Statistik, 2020. *“Kecamatan Rambah Samo Dalam Angka Tahun 2019”*
Rambah Samo : Kantor Camat Rambah Samo
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2019. *“Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Rokan Hulu Tahun 20016-2021”*
- Depertermen Pekerjaan Umum, (2019), *“Rencana Program Inventasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2019”*

Departemen Pekerjaan Umum, (2019), “*Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRWD)*”.

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2019), “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*”.

Efendi, dkk. 2016. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kawasan Agropolitan*” Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang <http://acakadul.wordpress.com> (Diakses 11 Maret 2019 Pukul 10:00)

Fladeo Simbolon, 2002. “*Kumpulan Analisis SWOT*” Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Hidayatullah, 2018. “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset*” <http://acakadul.wordpress.com> (Diakses 19 April 2019 Pukul 09:30)

Husaini ddk, 2009, “Defenisi Pendekatan Kuantitatif” di akses 20 November 2018. Lobok: http://www.Sarjanaku.com/2011/06/pendekatan_kualitatif.html

Khairudin, 2000. “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan*”. Jakarta: Depdikbud

Kamus Tata Ruang, 2008, Direktorat Jendral Cipta Karya Departement Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Jakarta.

Mahi K.A., 2014. “*Agropolitan : Teori dan Aplikasi*”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jhon McKnight, 2010. *“The Careless Society: The Community and Its counterfeits”*
New York; Basic Books

Mikkelsen, 2015, *“Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah dalam konsep partisipasi”*, ITB, Bandung.

Noor J., 2015. *“Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah”*,
Prenadamedia Group, Jakarta.

Rustiadi, dkk. 2001. *“Kawasan Agropolitan: Konsep Pembangunan Desa-Kota Berimbang”* Bogor: Center For Inretnasional forestry Reseach.

Ratika Nur Samyiar, 2016. *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Berbasis ABCD (Asset Baset Community Development) di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene”*. Skripsi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Alauddin, Makasar (Diakses 17 November 2018 Pukul 08:35)

Sarjono, 2001. *“Partisipasi Masyarakat dalam Pembagunan”* Surabaya: Yudhistira

Supranto F, 2000, *Statistik (Teori dan Aplikasi)*, Erlangga, Jakarta.

Tripono Adi Prabowo, 2014, *”Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabuapten Nganjuk”*